



***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAERAH MELALUI *BANYUWANGI*
*ETHNO CARNIVAL***

SKRIPSI

Oleh

**Bagus Nuari Harmawan
NIM. 100910201027**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAERAH MELALUI
BANYUWANGI ETHNO CARNIVAL**

*(Collaborative Governance in Regional Development Programme Cultural
Values Through Banyuwangi Ethno Carnival)*

SKRIPSI

Oleh

**Bagus Nuari Harmawan
NIM 100910201027**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAERAH MELALUI
BANYUWANGI ETHNO CARNIVAL***

*(Collaborative Governance in Regional Development Programme Cultural
Values Through Banyuwangi Ethno Carnival)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Bagus Nuari Harmawan
NIM 100910201027**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Suhardini dan Ayahanda Ibnu Mas'ud yang senantiasa memberikan do'a, restu dan bimbinganya sehingga memunculkan dorongan yang luar biasa bagi penulis untuk tetap berjalan lurus melwati segala bentuk rintangan dan cobaan;*
- 2. Orang terdekat selama lebih dari setengah waktu saya menempuh studi, Sofia Al Farizi, yang menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan segala bentuk tanggungan akademis di tingkat strata satu;*
- 3. Guru-guru yang telah mendidik saya sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;*
- 4. Saudara-saudaraku dan seluruh teman yang mendukung penyelesaian karya ini;*
- 5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.*

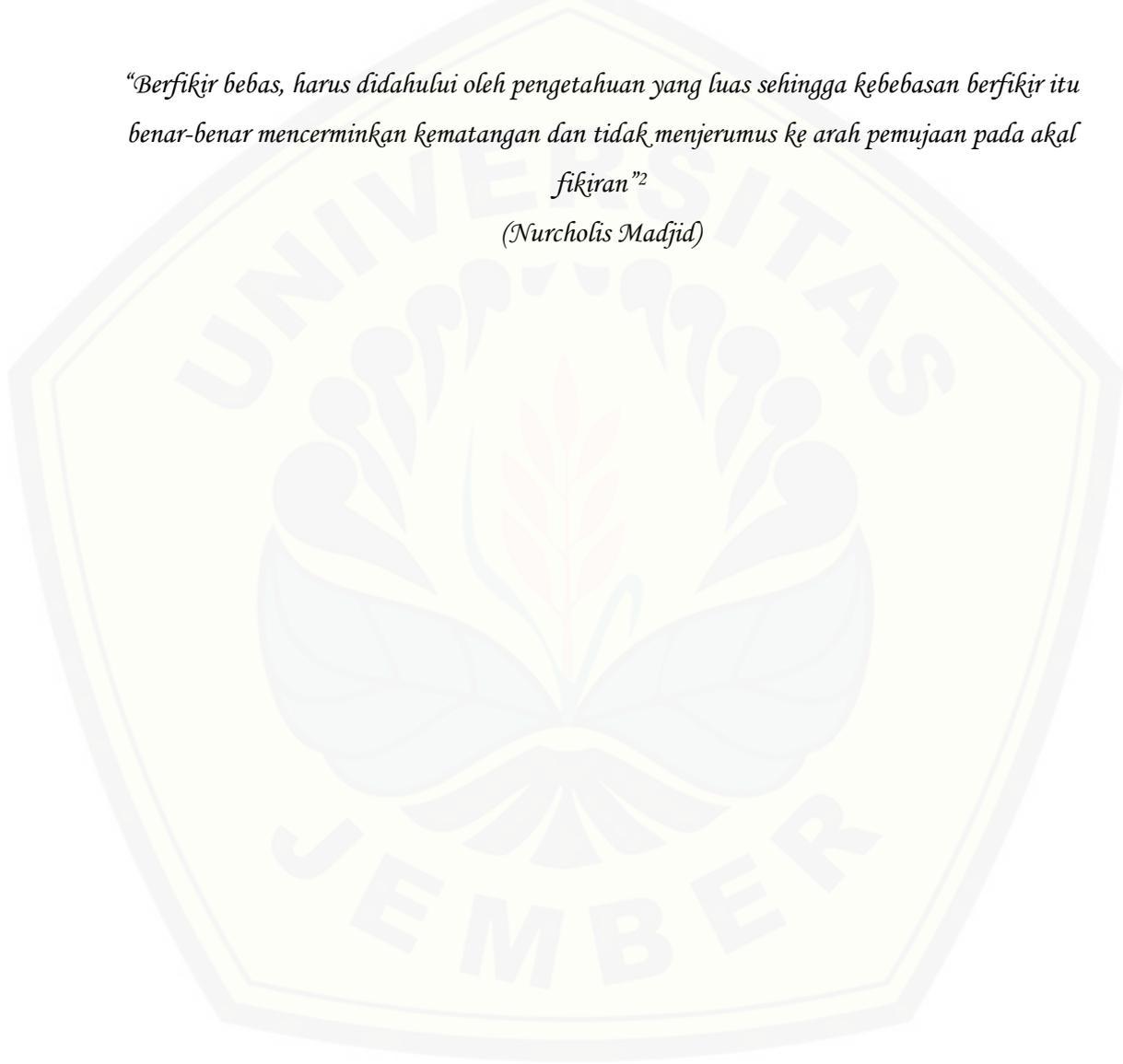
MOTTO

“Diantara Kerja, Karya dan Tindakan pilihlah Tindakan. Karena tindakan merupakan sikap yang bersifat orisinal dan tidak terbelenggu kepentingan tertentu”¹

(Hannah Arent)

“Berfikir bebas, harus didahului oleh pengetahuan yang luas sehingga kebebasan berfikir itu benar-benar mencerminkan kematangan dan tidak menjerumus ke arah pemujaan pada akal fikiran”²

(Nurcholis Madjid)



¹ Diambil dari Agus sudibyo, Politik Pemikiran Hannah Arent

² Diambil dari Ahmad Gaus A.F, Api Islam Nurcholis Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Nuari Harmawan

NIM : 100910201027

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui *Banyuwangi Ethno Carnival*” adalah benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi lain, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan acuan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2016

Yang menyatakan,

Bagus Nuari Harmawan

NIM 100910201027

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAERAH MELALUI BANYUWANGI
ETHNO CARNIVAL***

Oleh

Bagus Nuari Harmawan
NIM 100910201027

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati MM
Dosen Pembimbing Pendamping : Hermanto Rohman S.Sos, MPA

RINGKASAN

***Collaborative Governance* dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah melalui *Banyuwangi Ethno Carnival*:** Bagus Nuari Harmawan; 100910201027; 2016; 138 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Salah satu *event* yang ditampilkan untuk pengembangan budaya daerah adalah *Banyuwangi Ethno Carnival*. *Event Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi salah satu acara utama sekaligus unggulan Pemerintah Banyuwangi. Realitas tersebut dapat dilihat dengan hadirnya *Banyuwangi Ethno Carnival* dalam agenda wisata Nasional, dilaksanakan secara teratur tiap tahun dengan mempertahankan konsepnya sejak awal dan memberikan dampak terhadap penghargaan kebudayaan nasional kepada Kabupaten Banyuwangi. Kesuksesan yang dicapai oleh *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkolaborasi dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* pada tahun 2011 dan 2012, serta bekerjasama dengan Instruktur Karnival Putra Asli Banyuwangi sebagai konsultan di tahun 2013 dan 2014. Pada kolaborasi tersebut Dewan Kesenian Blambangan juga dilibatkan sebagai pihak yang memberi pertimbangan untuk aspek budaya khas Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dilaksanakan di empat lokasi, antara lain: (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; (2) Manajemen *Jember Fashion Carnival* (3) Dewan Kesenian Blambangan dan (4) Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi, serta menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *sampling purposive*. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan model analisis interaktif yang terbagi dalam tahap (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa proses *Collaborative Governance* yang diinisiasi oleh Bupati Banyuwangi, Azwar Anas dan mengamanahkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksana. Kerjasama yang terjalin antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dan Dewan Kesenian Blambangan terjalin melalui beberapa tahapan seperti dialog tatap muka, membangun *trust*, menjalin komitmen, membangun kesepahaman bersama hingga menghasilkan output kerjasama. Relasi yang terbangun antara Disbudparada Banyuwangi, Manajemen *Jember Fashion Carnival*, dan Dewan Kesenian Blambangan berlangsung hingga tahun 2012. Peran Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai konsultan digantikan oleh Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi untuk pelaksanaan BEC 2013 dan 2014. *Output* dari proses kolaborasi dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* menghasilkan beberapa tahapan antara lain, penentuan tema *Banyuwangi Ethno Carnival*, protoripe kostum peserta, sosialisasi peserta, musik pengiring *Banyuwangi Ethno Carnival*, audisi peserta, workshop *Banyuwangi Ethno Carnival*, *show time Banyuwangi Ethno Carnival*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan *stakeholder* non-pemerintah dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada awal kerjasama sempat muncul rasa tidak percaya antara Dewan Kesenian kepada Manajemen *Jember Fashion Carnival* terkait usaha untuk mempertahankan keaslian budaya. Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* terjalin hingga penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2012. Peran konsultan *Manajemen Jember Fashion Carnival* digantikan oleh Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi pada pelaksanaan karnaval 2013 dan 2014. Faktor Kebudayaan dan institusi menjadi salah satu hambatan membangun *collaborative governance* dalam Pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

PRAKATA

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah melalui *Banyuwangi Ethno Carnival*”. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

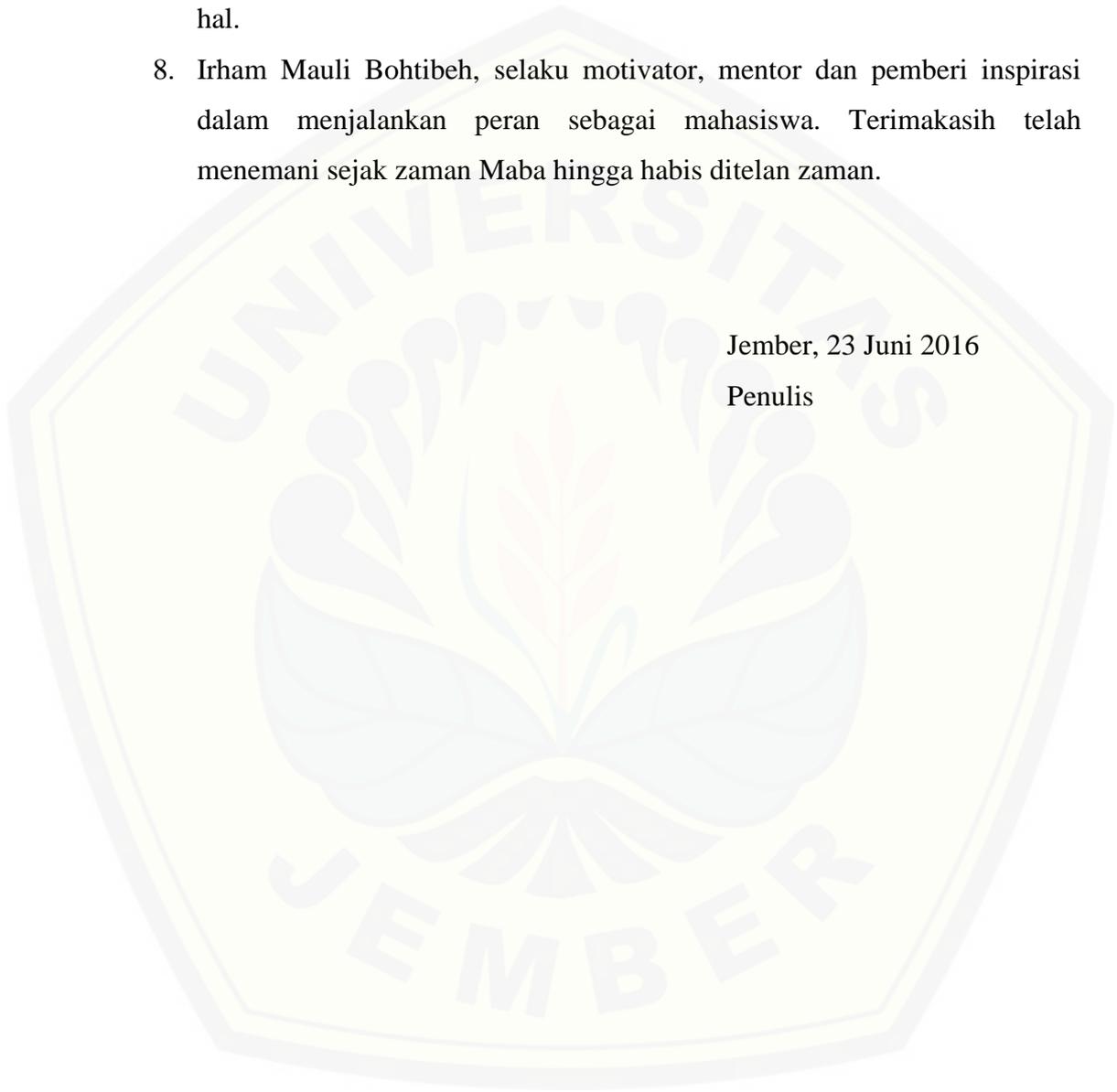
Penyusunan skripsi ini telah penulis selesaikan dengan tidak terlepas dari do’a, motivasi dan suntikan semangat dari kedua orang tua, dosen, saudara, sahabat dan seluruh teman-teman, serta seluruh pihak yang membantu proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada beberapa pihak, sebagai berikut.

1. Bapak Prof. Dr. Harry Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Supranoto M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM dan Hermanto Rohman S.Sos, MPA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan rasa terimakasih atas waktu, bimbingan, perspektif dan kesabaran dalam proses penyusunan skripsi, sehingga penulis mendapatkan sumbangsih pengetahuan yang bermuara pada kesempurnaan skripsi.
6. Kedua orang tua, Ibunda Suharmini dan ayahanda Ibnu Mas’ud yang telah memberikan restu, do’a dan semangat tiada henti selama penulis menempuh studi.

7. Ayunda Sofia Al Farizi, yang telah menemani dalam segala kondisi. Terima kasih atas semangat, motivasi dan penetapan standar masa depan sehingga penulis tidak lupa daratan dengan segala dinamika yang ada di tanah perantauan. Terimakasih atas kesabaran yang diberikan dalam segala hal.
8. Irham Mauli Bohtibeh, selaku motivator, mentor dan pemberi inspirasi dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa. Terimakasih telah menemani sejak zaman Maba hingga habis ditelan zaman.

Jember, 23 Juni 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	13
2.2 Konsepsi Dasar	13
2.2.1 Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah.....	14
2.2.2 Nilai Budaya.....	16
2.2.3 Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	17
2.2.4 Teori <i>Governance</i>	20
2.2.5 <i>Collaborative Governance</i>	22
2.2.6 <i>Stakeholder</i>	29
2.2.7 Kordinasi Pelaksanaan Program	30

2.2.8 <i>Public Private Partnership</i>	33
2.2.9 Konsep Peran	35
2.2.10 Kerangka Berfikir	35

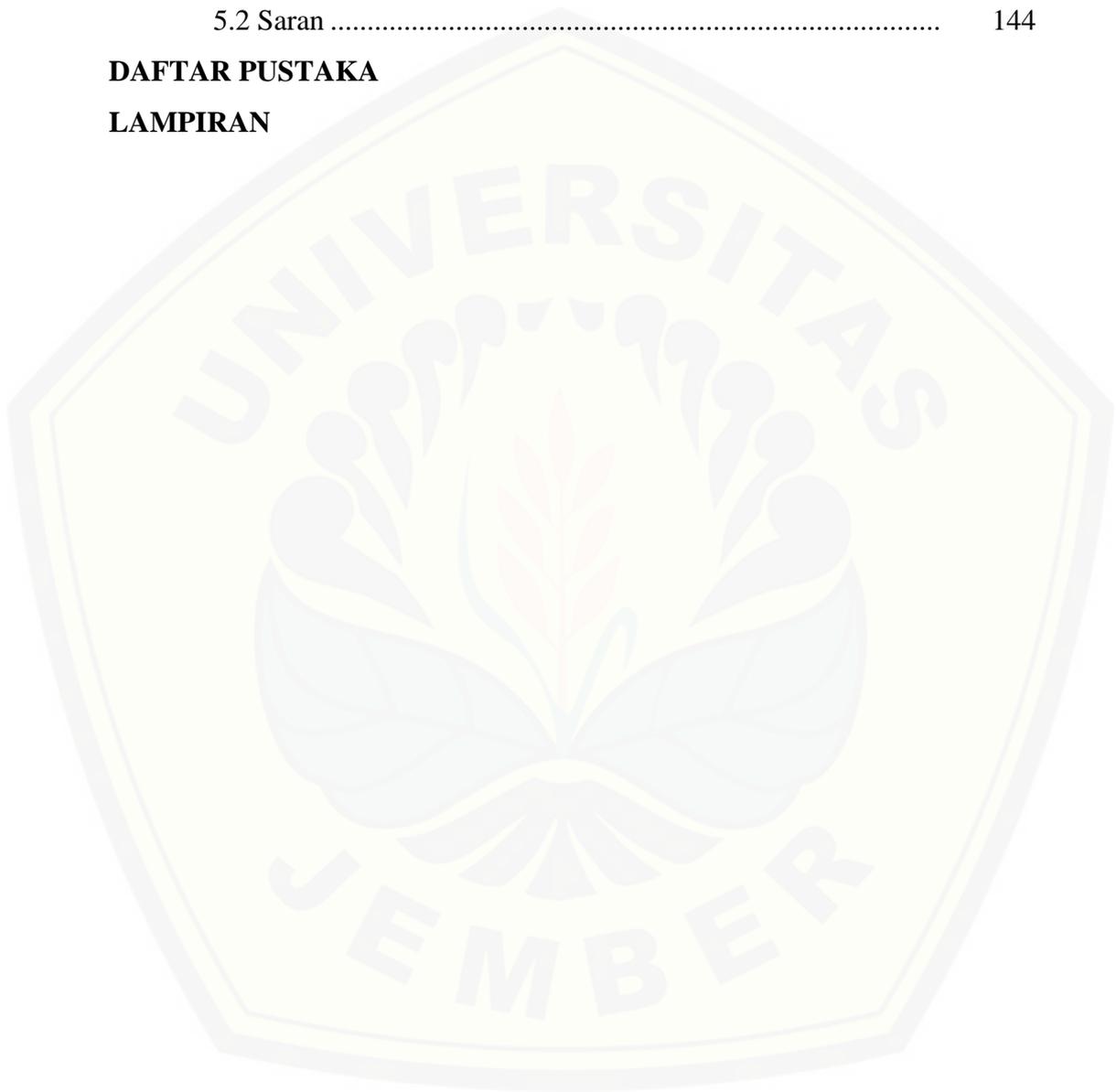
BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Fokus Penelitian.....	40
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.4 Data dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	42
3.6 Teknik dan Alat Pemerolehan Data	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	47

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

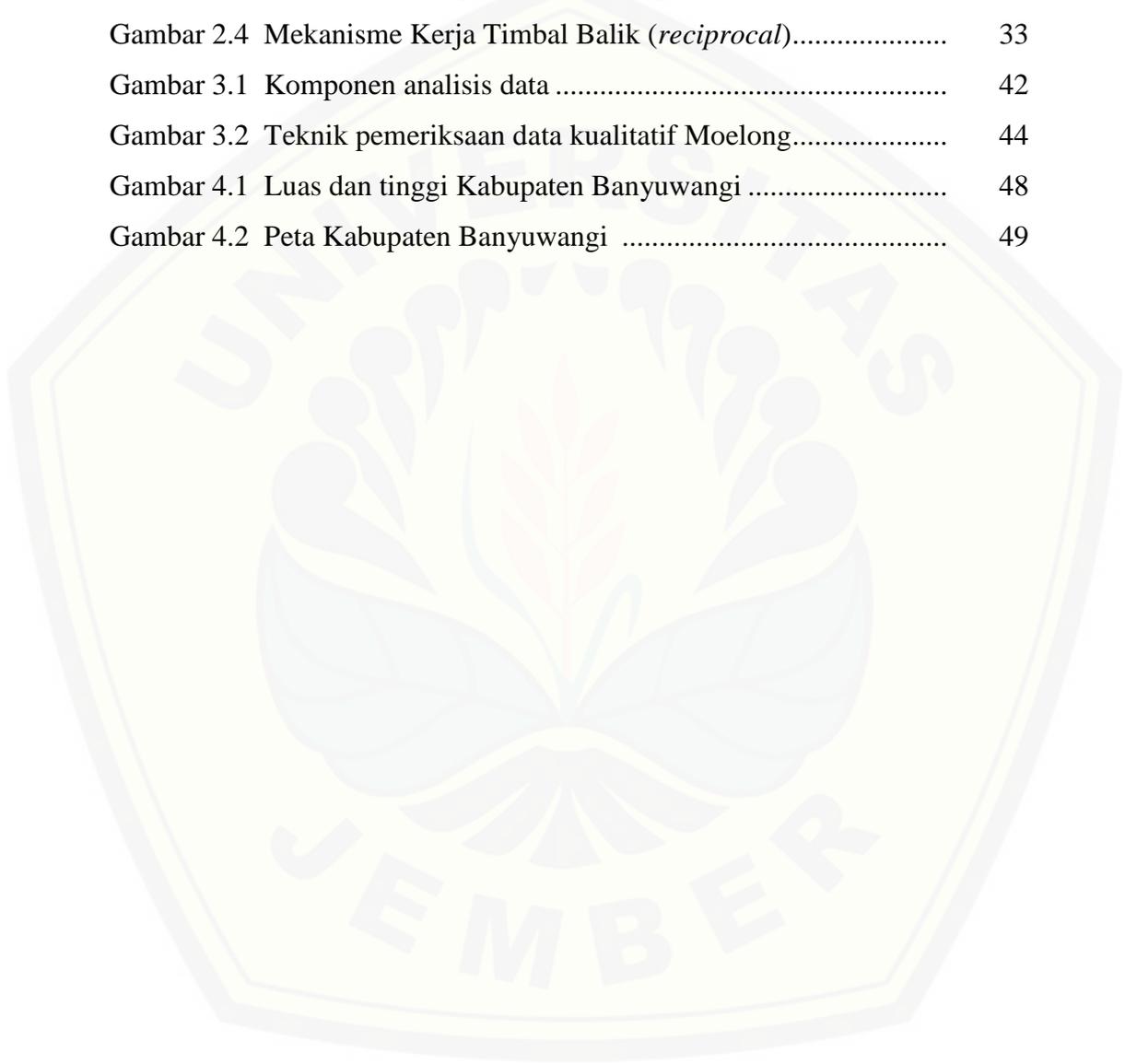
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi	50
4.1.2 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	56
4.1.3 Dewan Kesenian Blambangan	60
4.2 Pelaksanaan dan Pendanaan <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i> <i>2011-2014</i>	65
4.2.1 <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i> 2011.....	68
4.2.2 <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i> 2012.....	69
4.2.3 <i>Banyuwangi Etho Carnival</i> 2013.....	71
4.2.4 <i>Banyuwang Ethno Carnival</i> 2014.....	73
4.2.5 Anggaran <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i> 2011-2014..	76
4.3 Peran <i>Stakeholder</i> dalam <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i>	78
4.4 <i>Collaborative Governance</i> dalam <i>Banyuwangi Ethno</i> <i>Carnival</i>	92
4.5 Hambatan dalam <i>Collaborative Governance</i> pada pelaksanaan <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i>	136
4.5.1 Faktor Kebudayaan.....	136

4.5.2 Faktor Institusi	139
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	142
5.2 Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



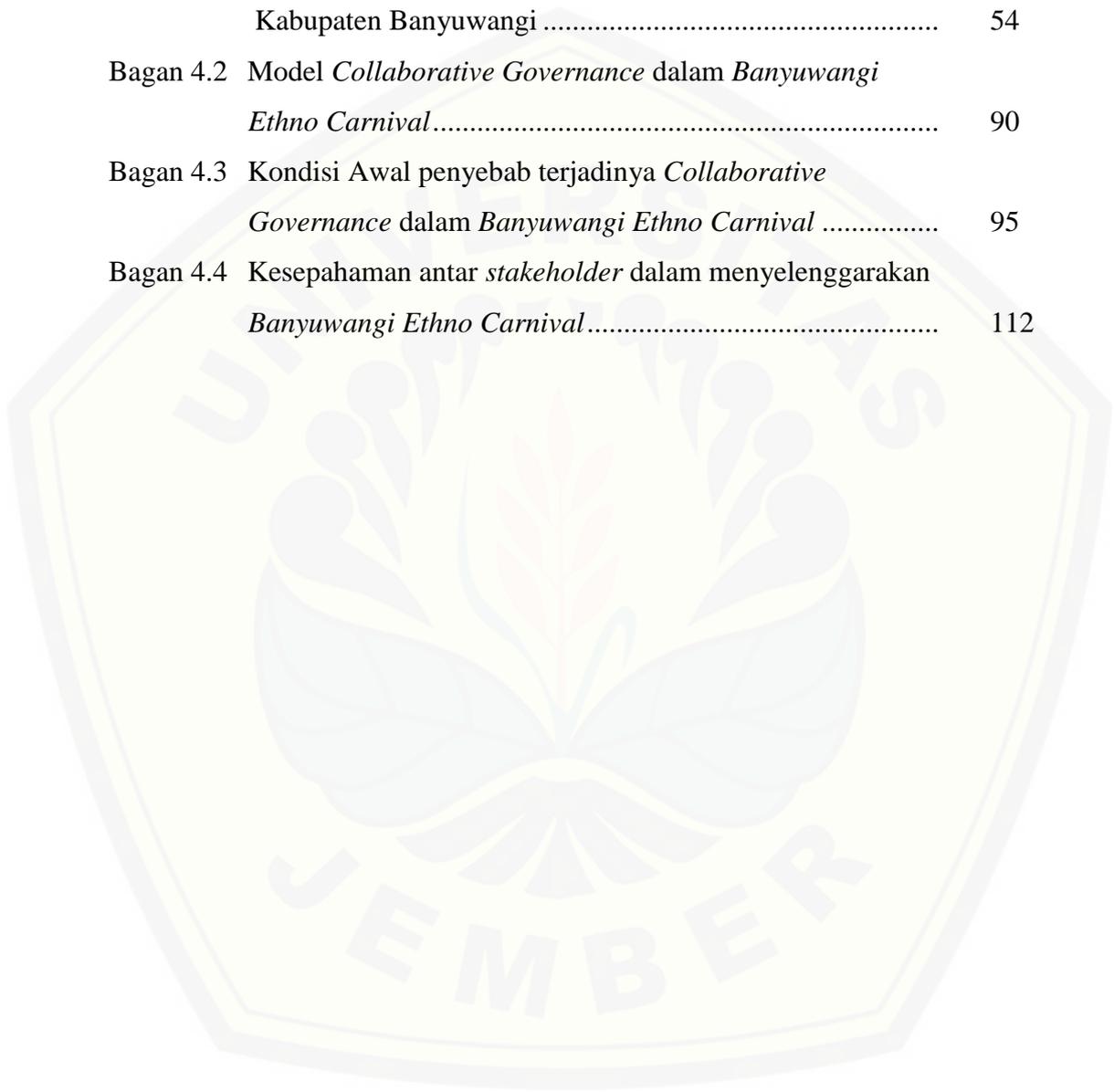
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Collaborative Governance Model</i>	23
Gambar 2.2 Mekanisme Kerja Mengutub (<i>pooled</i>)	31
Gambar 2.3 Mekanisme Kerja Berurutan (<i>sequenital</i>)	32
Gambar 2.4 Mekanisme Kerja Timbal Balik (<i>reciprocal</i>).....	33
Gambar 3.1 Komponen analisis data	42
Gambar 3.2 Teknik pemeriksaan data kualitatif Moelong.....	44
Gambar 4.1 Luas dan tinggi Kabupaten Banyuwangi	48
Gambar 4.2 Peta Kabupaten Banyuwangi	49



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berfikir.....	34
Bagan 4.1	Struktur Kepengurusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	54
Bagan 4.2	Model <i>Collaborative Governance</i> dalam <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i>	90
Bagan 4.3	Kondisi Awal penyebab terjadinya <i>Collaborative Governance</i> dalam <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i>	95
Bagan 4.4	Kesepahaman antar <i>stakeholder</i> dalam menyelenggarakan <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i>	112



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Porsi Struktural Disparda Kabupaten Banyuwangi	55
Grafik 4.2 Porsi riwayat pendidikan pejabat Disparda Banyuwangi	56
Grafik 4.3 Porsi Keahlian Bahasa HPI Cab. Banyuwangi	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Lampiran 2 Surat Pengantar dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 4 Kesepakatan Bersama Antara Bupati Banyuwangi dengan Jember Fashion Carnival
- Lampiran 5 Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- Lampiran 6 Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan Tahun 2014-2018
- Lampiran 7 Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan Tahun 2010-2013
- Lampiran 8 Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultan CV. Dinar
- Lampiran 9 Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2010-2015
- Lampiran 10 Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2011
- Lampiran 11 Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2012
- Lampiran 12 Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sosio kultural yang sangat beragam. Keberagaman sosio-kultural tersebut membuat masing-masing daerah di Indonesia kini memiliki ciri khas masing-masing. Hadirnya budaya khas yang kita rasakan di bumi pertiwi hari ini tidak terlepas dari proses interaksi antara berbagai macam cora-corak kebudayaan yang terjadi selama berabad-abad. Secara definitif menurut Geertz dalam Tuloli *et.al* (2003:2) kebudayaan adalah sistem pemaknaan bersama yang dan merupakan hasil dari proses sosial. Kebudayaan yang mencol dengan berbagai ciri khas dan beragam bentuk di daerah-daerah seluruh Indonesia adalah hasil warisan dari proses interaksi manusia yang sudah ada sejak berabad-abad lalu.

Kebudayaan merupakan satu tatanan nilai yang penting untuk dipertahankan karena berfungsi sebagai identitas baik individu, kelompok, daerah maupun bangsa. Usaha pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya, harus terdapat relasi antara orientasi pembangunan dengan kebudayaan. Pembangunan menjadikan budaya sebagai referensi dan acuan dalam menentukan makna dan ke arah mana pembangunan itu akan dilaksanakan. Menurut Koentjaraningrat dalam Tuloli *et al* (2003:4) terdapat beberapa dimensi yang harus diperhatikan antara pembangunan dan warisan budaya, antara lain.

a. Mental pembangunan

Mengembangkan mental pembangunan memerlukan nilai budaya yang diaplikasikan dalam diri manusia;

b. Emosi kemanusiaan

c. Keterbukaan kultural

Budaya tidak lagi bernuansa tertutup tetapi telah terbuka. Loyalitas orang terhadap adat-istiadat dan moral tidak lagi berpusat tunggal pada budaya asli tetapi lebih bersifat multidimensi;

d. Basis perencanaan dan strategi pembangunan

Memerlukan pertautan antara strategi pembangunan dengan kebudayaan. meskipun orientasi pembangunan adalah perubahan tetapi budaya memberikan referensi terkait tahapan yang dimiliki manusia untuk menyempurnakan diri dalam kondisi hidupnya. Kebudayaan menjadi sumber yang asli dan kaya untuk mengembangkan pola pikir, sikap dan tindak komunitas dalam menyikapi pembangunan.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki otoritas yang luas untuk mengatur segala macam potensi yang dimiliki termasuk kebudayaan. Salah satu daerah yang melaksanakan pembangunan dengan melibatkan pelestarian dan pengembangan budaya adalah kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi merupakan daerah yang mempunyai beraneka ragam adat budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya hingga kini. Berbagai jenis kebudayaan tari, ritual adat, dan beberapa kebiasaan yang telah menjadi tradisi dimiliki oleh Banyuwangi.

Banyuwangi memiliki beraneka ragam budaya yang masuk menjadi aset budaya nasional. Beberapa budaya Banyuwangi yang masuk menjadi aset budaya nasional antara lain, tari gandung, tari seblang dan upacara adat Tumpeng Sewu (kompas.com). Diluar budaya tersebut, daerah Banyuwangi masih memiliki beraneka ragam budaya seperti Kebo-Keboan, Petik Laut, Barong, Angklung Caruk, dan beberapa kesenian tari lainnya. Masyarakat Banyuwangi masih mempertahankan adat dan budaya yang dimiliki sampai kini.

Mengacu pada RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi 2010-2015, kebijakan kebudayaan diarahkan pada pengembangan budaya daerah dan nilai-nilai tradisional untuk memperkuat jati diri daerah. Salah satu program yang di munculkan adalah program pengembangan nilai budaya daerah. Pemerintah daerah Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

memiliki beberapa rincian indikator kinerja yang menjadi tujuan dalam program pengembangan nilai budaya lokal, antara lain.

1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Pelestarian budaya lokal khususnya osing yang berwawasan nusantara;
3. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan berbudaya dan beragama;
4. Sosialisasi pengembangan budaya lokal;
5. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan pengembangan pariwisata;
6. Pengintegrasian budaya lokal dengan pengembangan pariwisata;
7. Penyusunan buku dan penelitian sejarah lokal Banyuwangi.

Untuk memenuhi indikator diatas, pemerintah Banyuwangi melaksanakan beberapa kegiatan dalam program pengembangan nilai budaya daerah sesuai dengan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2011-sampai 2014.

- a. *Banyuwangi Ethno Carnival*;
- b. Festival karya tari daerah;
- c. Pementasan sanggar tari sebagai aktualisasi pengembangan seni daerah;
- d. Pengemasan kegiatan upacara adat budaya daerah.

Banyuwangi Ethno Carnival merupakan karnaval tahunan yang berkonsep representasi budaya khas banyuwangi. Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan ciri khas yang unik. Berangkat dari kekayaan khasanah seni budaya yang dimiliki, *Banyuwangi Ethno Carnival* diharapkan mampu untuk menjembatani modernisasi seni budaya lokal yang selama ini tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat menjadi sebuah event dalam bentuk parade berskala Internasional tanpa harus merubah nilai-nilai yang sudah berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat baik spirit maupun filosofinya (Banyuwangibagus.com). Desain dan tema dalam *event Banyuwangi*

Ethno Carnival adalah kolaborasi antara seni budaya khas Banyuwangi dengan kemasan modernitas.

Banyuwangi Ethno Carnival adalah salah satu event Kebudayaan unggulan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Indikasi tersebut tidak terlepas dari usaha pemerintah Banyuwangi mendorong *event Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi acara yang berskala internasional. Tahun 2014 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendukung *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk kalender pariwisata nasional. Melalui Menteri Pariwisata Arief Yahya, mengagendakan acara *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk dalam promosi wisata yang mencakup nasional maupun mancanegara. Lebih lanjut, Arief Yahya menyatakan "setuju dan mendukung *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk kalender pariwisata nasional dan agenda wisata bagus seperti di Banyuwangi ini promosinya jangan hanya lokal, tapi juga harus internasional ke mancanegara" (Antaraneews.com). Penempatan *Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi salah satu acara yang masuk dalam agenda nasional memunculkan ekspektasi yang besar bagi pemerintah Banyuwangi dalam pengenalan budaya Banyuwangi ke negara lain. Legitimasi yang di peroleh *Banyuwangi Ethno Carnival* dari pemerintah pusat untuk dijadikan agenda nasional tidak terlepas dari inovasi dan desain yang diciptakan dalam setiap penyelenggaraan acara. Menurut Azwar Anas, "Banyuwangi Ethno Carnival mempunyai perbedaan dibandingkan festival yang ada di daerah lain, karena mampu untuk mengusung tema kebudayaan lokal dengan desain modern untuk diperkenalkan diluar negeri (liputan6.com).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam melaksanakan *Banyuwangi Ethno Carnival* secara rutin setiap tahun dan mampu menunjukkan komitmen dalam mengkolaborasikan budaya lokal dengan kemasan modernitas pada setiap penyelenggaraan acara. Pada awal pelaksanaanya di tahun 2011, *Banyuwangi Ethno Carnival* mengambil tari Gandrung, Damarwulan, dan Kunduran sebagai tema acara (<http://www.banyuwangibagus.com>). Tema tersebut merupakan representasi dari budaya yang bersumber dari mitologi khas Banyuwangi. Pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2012 mengambil tema "Re-Barong" Using. Pengambilan tema "Re-Barong" di dasari oleh upaya

Banyuwangi memperkenalkan Barong Khas Banyuwangi dengan segala macam keunikannya. Meskipun selama ini Barong menjadi salah satu budaya khas Bali tetapi Banyuwangi juga memiliki satu budaya barong yang khas daerahnya.

Pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2013 mengambil tema “The Legend Of Kebo-Keboan”. Budaya tersebut merupakan salah satu warisan budaya khas Banyuwangi. Kebo-keboan adalah ritual yang telah berlangsung selama ratusan tahun yang berisi doa dan permohonan untuk mendatangkan rezeki yang melimpah, kesuburan sawah dan panen yang melimpah. Pada event tersebut terdapat tiga sub tema yang diangkat antara lain Kebo Geni (menandakan semangat dan jiwa pemberani), Kebo Bayu Tirta (penanda kedamaian), dan Kebo Bumi dengan makna isyarat kesuburan (liputan6.com). Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2014 mengambil tema tari Seblang. Tari seblang adalah tarian ritual tertua yang ada di Banyuwangi dan telah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional oleh pemerintah pusat (Banyuwangibagus.com). Ritual tari seblang merupakan budaya khas wisata masyarakat using yang memiliki makna untuk menghilangkan rasa sial dan sebagai rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan. Secara tradisi, tari Seblang oleh seorang perempuan muda yang dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut dan dilaksanakan setelah hari raya idul fitri berlangsung satu minggu.

Banyuwangi Ethno Carnival yang dilaksanakan secara rutin dengan kolaborasi budaya lokal dan desain modernitas mampu memberikan dampak terhadap citra budaya Banyuwangi di lingkup nasional. Salah satu pencapaian positif yang diberikan dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah penghargaan Kebudayaan 2015 yang di berikan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tanpa mengesampingkan kegiatan kebudayaan lain yang ada di Banyuwangi. Salah satu poin yang mendapatkan nilai lebih dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata terkait pelestarian budaya Banyuwangi adalah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Banyuwangi dalam menjalankan berbagai event kebudayaan secara konsisten dan budaya daerah ditampilkan secara berbeda dan istimewa (banyuwangikab.go.id). *Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi salah

satu bukti dari usaha pemerintah Banyuwangi dalam melaksanakan setiap event budaya dengan desain yang berbeda dan istimewa.

Kesuksesan yang di capai dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku penanggung jawab acara melibatkan aktor non-pemerintah dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain, pemerintah, pihak swasta sebagai *event organizer*, budayawan, instansi sekolah dan masyarakat. Masing-masing *stakeholder* tersebut membangun relasi antar aktor sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pemerintah Banyuwangi selaku implementor utama pelaksanaan program pengembangan nilai budaya lokal yang mencakup *event Banyuwangi Ethno Carnival* bertugas menjadi penanggung jawab dalam setiap penyelenggaraan. Konsep yang dibangun dalam *event Banyuwangi Ethno Carnival* adalah carnival dengan desain kolaborasi budaya lokal dengan desain modernitas, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan peran sumber daya non-pemerintah agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Banyuwangi Ethno Carnival, antara lain.

1. Melibatkan Manajemen *Jember Fashion Carnival* yang telah sukses menyelenggarakan *Jember Fashion Carnival* sebagai *Event Organizer*;
2. Dewan Kesenian Blambangan;
3. Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi.

Pola kerjasama yang terbangun antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan *stakeholder* non- pemerintah adalah bersifat kolaborasi. Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2007:2) *Collaborative Governance* adalah “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or asset (Pengaturan yang mengatur pada satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung

stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta hal itu bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik). Pada pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memberikan peran kepada masing-masing *stakeholder* untuk melaksanakan fungsi kerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Pemerintah Banyuwangi melaksanakan kerjasama dengan *event organizer* Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai konsultan acara *Banyuwangi Ethno Carnival*. Pertimbangan yang dimiliki oleh pemerintah Banyuwangi mengikutsertakan Manajemen *Jember Fashion Carnival* menjadi *Event Organizer* tidak terlepas dari kesuksesan dan pengalaman dalam menyelenggarakan *Jember Fashion Carnival* (Tempo.com). Keterlibatan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* disebabkan oleh *track record* yang dimiliki tim tersebut dalam menyelenggarakan acara di Jember maupun di beberapa daerah lain. Manajemen *Jember Fashion Carnival* merupakan tim terbaik yang memiliki ambisi untuk semakin mensukseskan acara karnaval di berbagai daerah Indonesia dengan mengawal acara-acara Karnaval. Ambisi tersebut semakin komplis dengan adanya keterikatan berupa pakta Integritas yang dimiliki sehingga Manajemen *Jember Fashion Carnival* dapat memberikan dampak dan perannya pada *Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil Hasil wawancara dengan Iwan, Staff Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai berikut.

“Keikutsertaan Manajemen *Jember Fashion Carnival* tidak terlepas dari keinginan pemerintah Banyuwangi untuk membantu menyelenggarakan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Tim Manajemen JFC adalah yang terbaik dalam menyelenggarakan *event* karnaval mulai dari pelaksanaan karnaval di tenggarong sampai di Solo. Kerjasama yang terjalin antara kami dengan pemerintah bersifat MOU dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan kontrak kerja tersebut kami terikat dalam 3 kali pelaksanaan karnaval. Kami diberikan tugas untuk menjadi konsultan BEC serta mendelegasikan penari kami untuk terlibat di acara dan menerjunkan instruktur untuk melatih peserta”. (Senin, 25 Januari 2016)

Lebih lanjut, melibatkan *Event Organizer* dari luar digunakan untuk mematangkan konsep acara karena bisa diasumsikan bahwa *event Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi kegiatan kebudayaan yang baru dimunculkan oleh pemerintah daerah Banyuwangi. *Event Organizer Manajemen Jember Fashion Carnival* berperan menjadi tim konsultan sesuai dengan konsep acara yang telah ditentukan. Peran event organizer Manajemen *Jember Fashion Carnival* hanya berlangsung pada penyelenggaraan tahun 2011 dan 2012. Untuk pagelaran tahun 2013 dan 2014 pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjuk Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi untuk menggantikan peran Manajemen JFC sebagai Instruktur Karnaval Banyuwangi Ethno Carnival. Penunjukan tim instruktur karnaval tersebut tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki *skill* dalam memberikan pelatihan kepada peserta Banyuwangi Ethno carnival Hasil Wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

“Untuk menggantikan peran Manajemen *Jember Fashion Carnival* yang tidak melanjutkan kerjasama pada penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival 2013, kami menunjuk instruktur karnaval putra asli Banyuwangi sebagai instruktur karnaval. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi instruktur Karnaval Banyuwangi Ethno carnival setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Manajemen JFC”. (Rabu, 13 Januari 2016)

Pada pelaksanaan *event Banyuwangi Ethno Carnival* Dewan Kesenian Blambangan berperan untuk memberikan pertimbangan dalam setiap penentuan tema cara maupun memberikan masukan terkait instrumen-instrumen budaya yang menjadi ciri khas. Beberapa aspek yang menjadi penilaian Dewan Kesenian Blambangan dalam pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* antara lain, tema kebudayaan khas Banyuwangi, Detail kostum, maupun alat musik yang menjadi pengiring dalam pelaksanaan acara. Menurut Bupati Banyuwangi Azwar anas, "Selain mereka memiliki pengetahuan lebih, keterlibatan budayawan untuk menjaga norma serta pakem-pakem tradisi setiap atraksi budaya yang akan kami tampilkan, inilah cara Banyuwangi memperkenalkan budaya lokalnya ke publik

global di saat daerah lain getol justru membawa tema global dalam eventnya"(banyuwangikab.go.id).

Motif Keterlibatan Dewan Kesenian Blambangan yang menaungi budayawan tradisional Banyuwangi untuk terlibat dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah untuk menjaga keaslian budaya Banyuwangi. Sikap dari Dewan Kesenian Blambangan tersebut ada dikarenakan konsep yang dibawakan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* mengkolaborasikan antara unsur tradisional dengan unsur modern. Landasan sikap menjaga tradisi yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Blambangan mengacu pada SK yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi di tahun 2010 tentang tugas Dewan Kesenian Blambangan untuk terlibat dalam pengembangan dan menjaga budaya asli Banyuwangi. Hasil wawancara dengan Bambang Lukito, sekretaris Dewan Kesenian Blambangan sebagai berikut.

“Dewan Kesenian Blambangan merupakan sebuah wadah bagi budayawan banyuwangi sejak tahun 80-an untuk mengamati perkembangan sekaligus pelestarian budaya asli Banyuwangi. Dewan Kesenian Blambangan mendapatkan legitimasi dari pemerintah untuk mengamati budaya Banyuwangi mengacu pada SK Bupati. Pada pelaksanaan BEC, Sejak awal Dewan Kesenian Blambangan telah diajak berkomunikasi oleh Azwar Anas untuk membicarakan pelaksanaan karnaval budaya di Banyuwangi. Kami memberikan banyak sekali pertimbangan terkait kebutuhan yang diperlukan dalam menyelenggarakan acara tersebut. Pada beberapa tahapan lanjutan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kami diajak untuk berperan serta lebih jauh. Memang keterlibatan Dewan Kesenian Blambangan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak bersifat kontrak kerja, tetapi ketika kegiatan tersebut menyangkut aspek kebudayaan otomatis kami akan terlibat langsung di dalamnya. Segala aspek yang menyangkut budaya lokal Banyuwangi menjadi hak dari Dewan Kesenian Blambangan untuk terlibat langsung didalamnya”.
(Kamis, 14 Januari 2016)

Masyarakat umum dan pelajar Banyuwangi diberikan kesempatan untuk berpartisipasi menjadi peserta dalam *Banyuwangi Ethno Carnival*. Pemerintah Banyuwangi membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin menjadi peserta dan masing-masing lembaga pendidikan setingkat SD, SMP maupun SMA ikut dilibatkan dalam acara. Masing-masing instansi pendidikan negeri di

Kabupaten Banyuwangi mengirimkan perwakilan pelajar dari masing-masing sekolah untuk menjadi peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkordinasi dengan Kepala Sekolah se- Kabupaten Banyuwangi terkait peran serta pelajar dalam pelaksanaan acara Banyuwangi Ethno Carnival (banyuwangikab.go.id). Peserta yang berasal dari kalangan pelajar akan mengikuti beberapa pelatihan yang diperlukan untuk mensukseskan acara *Banyuwangi Ethno Carnival*. Menurut Suprayogi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, “seluruh pelajar yang menjadi peserta akan mendapatkan pelatihan basic tentang koreografi, tari, kostum, dan ekspresi, peserta diharapkan untuk mengeluarkan seluruh potensi, kreatifitas, inovasi dan mampu ber-improvisasi” (Banyuwangikab.go.id). Tahapan selanjutnya yang akan dilalui masing-masing peserta adalah mengikuti *workshop* dan akan melaksanakan seleksi akhir terkait dengan desain kostum yang akan ditampilkan pada acara.

Seluruh peserta baik pelajar atau masyarakat umum akan mengikuti beberapa tahapan penjurian sebelum lolos menjadi peserta Banyuwangi Ethno carnival. Para peserta mengikuti berbagai rangkaian acara mulai dari penjurian awal hingga saat show time, tim juri yang terdiri dari Budayawan, Fotografer dan Perias pengantin pun meneliti setiap kostum peserta, baik dari segi kreatifitas kostum, ekspresi ,gerak tari hingga interaksi kepada seluruh penonton menjadi penilaian tersendiri bagi juri (Banyuwangitourism.com). Melibatkan peserta yang berasal dari kalangan anak muda adalah usaha pemerintah untuk memperkenalkan budaya khas daerah dan pelestarian nilai kebudayaan Banyuwangi. Kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi kunci dalam kesuksesan acara yang berhasil di gelar rutin setiap tahun. Kolaborasi yang terjadi antar *stakeholder* memunculkan dampak positif berupa pembenahan-pembenahan terkait hal strategis maupun teknis acara sehingga *event* Banyuwangi Ethno Carnival dapat dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Pemerintah Banyuwangi secara umum mampu melaksanakan kerjasama yang baik dengan swasta maupun masyarakat dalam mensukseskan acara. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah digambarkan diatas, penulis tertarik untuk

melaksanakan penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui *Banyuwangi Ethno Carnival*”.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pola terbentuknya *Collaborative Governance* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014?
2. Bagaimana peran dan mekanisme kerja masing-masing *stakeholder* dalam tahapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan penulis, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pola terbentuknya *Collaborative Governance* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014.
2. Mendeskripsikan peran dan mekanisme kerja masing-masing *stakeholder* dalam tahapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi:

- a. Bagi kalangan akademis

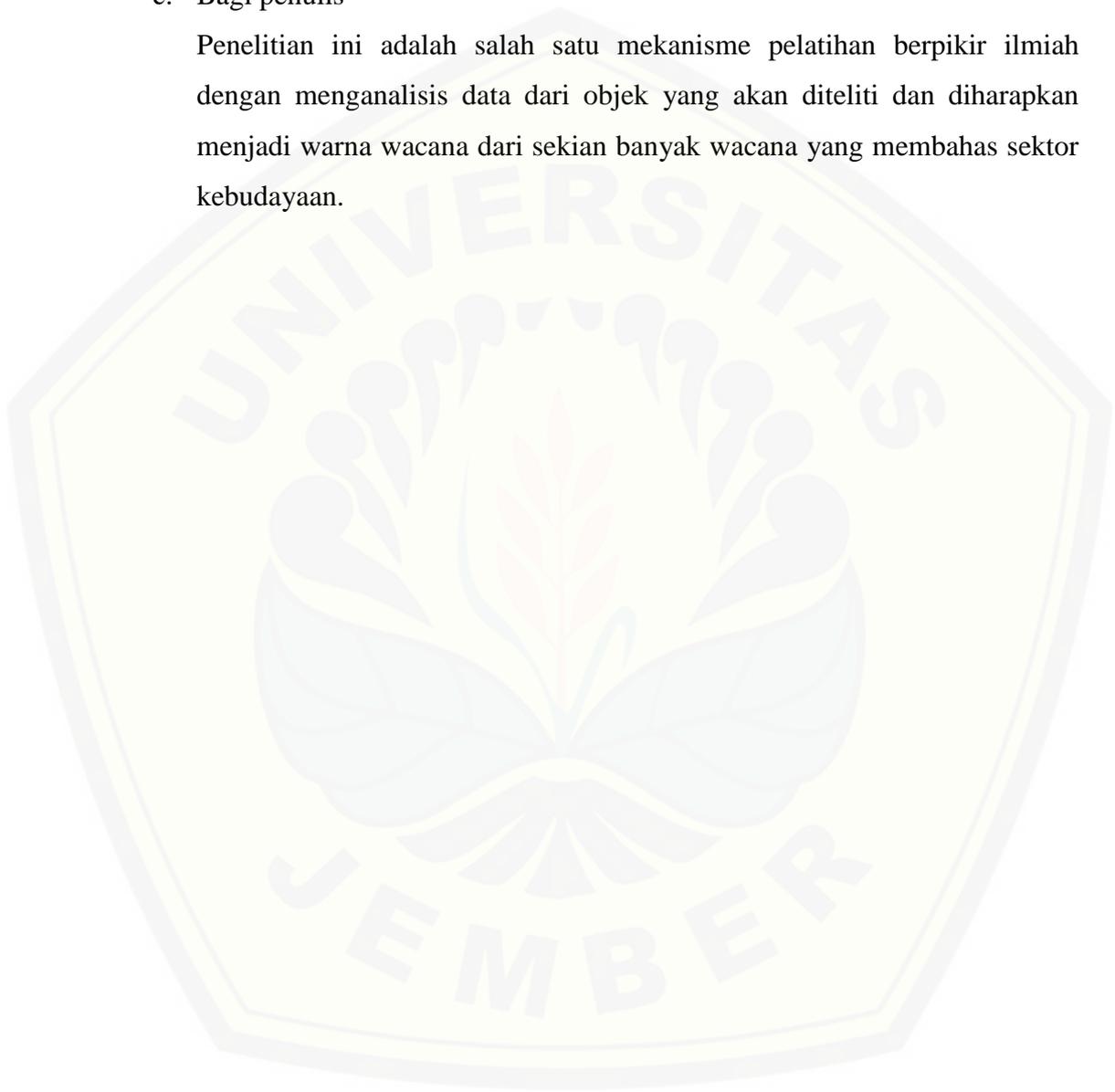
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berminat pada kajian sektor kebudayaan.

- b. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah, swasta maupun *civil society* dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Banyuwangi .

c. Bagi penulis

Penelitian ini adalah salah satu mekanisme pelatihan berpikir ilmiah dengan menganalisis data dari objek yang akan diteliti dan diharapkan menjadi warna wacana dari sekian banyak wacana yang membahas sektor kebudayaan.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Pelaksanaan sebuah penelitian mengharuskan adanya mekanisme berfikir yang sistematis, logis dan metodologis. Peneliti memerlukan adanya pandangan teoritis yang akan mendasari perspektifnya dalam memecahkan permasalahan penelitian. Konsepsi dasar berfungsi menjadi alat analisis peneliti dalam mendeskripsikan fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian.

Gulo (2002:8) mendeskripsikan konsep adalah sesuatu yang abstrak tetapi menunjukkan pada sesuatu yang konkret. Konsep memiliki tingkatan abstraksi yang tinggi sampai yang rendah. Gabungan beberapa konsep tersebut akan membentuk proposisi. Proposisi memiliki fungsi untuk membentuk teori dan membutuhkan konsep sebagai bahan bakunya. Marx dan Goodson dalam Moloeng (2004:35) menyatakan bahwa teori adalah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian (yang diukur), mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan demikian dan hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung. Teori menjadi bahan atau rujukan bagi peneliti untuk menjelaskan berbagai variabel yang muncul dalam fenomena yang diteliti.

2.2 Konsepsi Dasar

Konsepsi dasar terdiri atas teori-teori yang dimunculkan sebagai alat untuk mendeskripsikan unsur-unsur yang terdapat dalam fenomena penelitian secara *rigid* dan sistematis. Konsepsi dasar memiliki tujuan untuk memudahkan dan memberi landasan pokok kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti suatu penelitian. Snelbecker dalam Moelong (2004:35) menyatakan ada empat fungsi suatu teori sebagai berikut.

- a. Mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian;

- b. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban;
- c. Membuat ramalan atas dasar penemuan;
- d. Menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan “Mengapa”.

Teori secara tidak langsung berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dasar yang digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Konsepsi tersebut antara lain terdiri atas :

- a. program pengembangan nilai budaya daerah;
- b. nilai budaya;
- c. pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- d. teori *governance*;
- e. *collaborative governance theory*;
- f. *stakeholder*;
- g. kordinasi dalam pelaksanaan program.

2.2.1 Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Berpedoman pada RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kebijakan umum pembangunan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 diarahkan pada pengembangan budaya daerah dan nilai-nilai tradisional untuk memperkuat jatidiri daerah dengan sasaran.

1. Berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan;

2. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan seni dan budaya;
3. Meningkatnya kesempatan untuk pengembangan ekonomi lokal, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi potensi budaya sekaligus mengembangkan dan melindungi potensi.

Penetapan indikator kinerja merupakan bagian internal dari perencanaan strategik. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber-sumber daya digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan. Beberapa indikator kinerja dalam program pengembangan wawasan budaya lokal sebagai berikut.

1. peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. pelestarian budaya lokal khususnya osing yang berwawasan nusantara;
3. peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan berbudaya dan beragama;
4. sosialisasi pengembangan budaya lokal;
5. pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan pengembangan pariwisata;
6. pengintegrasian budaya lokal dengan pengembangan pariwisata;
7. penyusunan buku dan penelitian sejarah lokal Banyuwangi.

Pemerintah Banyuwangi melaksanakan beberapa kegiatan dengan berpedoman pada indikator kinerja program pengembangan wawasan budaya lokal, yaitu :

- a. *Banyuwangi Ethno Carnival*;
- b. Festival Endog-endogan;
- c. Festival karya tari daerah;
- d. Pementasan sanggar tari sebagai aktualisasi pengembangan seni daerah;
- e. Pengemasan kegiatan upacara adat budaya daerah.
- f. Pembuatan buku sejarah lokal Banyuwangi.

2.2.2 Nilai Budaya

Para pakar antropologi Indonesia umumnya sependapat bahwa kata "kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *Buddhayah*. Kata *Buddhayah* adalah bentuk jamak dari budi atau akal (Maran,2007:24). Menurut Koentjaraningrat dalam Maran (2007:4) secara etimologis, kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal. kata kebudayaan bisa di seajarkan dengan kata *culture*. kata *culture* berasal dari bahasa latin *colere* yang berarti merawat, memelihara, menjaga, mengolah.

Terdapat berbagai definisi atau pengertian terkait dengan kebudayaan menurut para ahli.

- a. Cliffort Geert dalam Tuloli *et al* (2003:2) Mendefinisikan Kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersama, dan merupakan hasil dari proses sosial dan bukan dari proses individu;
- b. Menurut Koentjaraningrat dalam Maran (2007:26) Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar;
- c. Menurut Robert H. Lowie dalam Maran (2007:26) Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal maupun informal.

Nilai budaya secara konvensional disepakati oleh pemiliknya sebagai acuan dan pedoman untuk mengatur interaksi sosial dan mencapai tujuan mulia yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan kemanusiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nilai Budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan sangat bernilai bagi kehidupan. Menurut Sutarto (2004: 4) sistem nilai budaya merupakan inti kebudayaan. Lebih lanjut, sebagai inti nilai budaya akan mempengaruhi dan menata elemen yang berada pada struktur permukaan kehidupan manusia, karena itu, suatu sistem nilai

budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi kelakuan manusia. Menurut Koentjaraningrat dalam Sutarto (2004: 4) sistem nilai budaya menjadi pedoman sistem tata kelakuan manusia yang tingkatnya lebih konkrit, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma.

2.2.3 Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Menurut Tuloli (2003:27) Komponen yang digunakan untuk pelestarian, pemanfaatan, dan bagaimana mekanisme yang harus digunakan untuk mempertahankan warisan budaya, sebagai berikut.

a. Komponen pelaksana

Secara umum pelaksana pemeliharaan warisan budaya adalah warga negara atau masyarakat. Selain warga negara, secara otoritas yang memiliki tanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain.

- 1) Menentukan kebijakan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya;
- 2) Mempersiapkan berbagai proyek yang memungkinkan terjadinya pelestarian dan pemanfaatan, yaitu penelitian, pendokumentasian, pengumpulan, pengkajian, penyimpanan dan pembinaan;
- 3) Menerapkan nilai-nilai warisan budaya dalam interaksi dan komunikasi pemerintahan secara vertikal maupun horisontal, intern maupun ekstern, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat luas;
- 4) Mengembangkan kepribadian yang menghargai dan menghormati serta mencintai warisan budaya baik yang berbentuk fisik, nilai-nilai, norma-norma, moral-moral. adat istiadat, kepercayaan;
- 5) Menyiapkan dana untuk kegiatan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.

Selain komponen pemerintah, pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah akademisi, swasta, tokoh masyarakat, politisi, wartawan.

b. Kegiatan

Tindakan yang nyata berupa kegiatan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya menjadi kunci untuk penyelesaian permasalahan mempertahankan tumbuh kembangnya satu budaya. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan menciptakan paket kegiatan, antara lain.

- 1) Mengadakan inventarisasi dan pengumpulan warisan budaya daerah secara bertahap dan menyeluruh;
- 2) Membuat peta penyebaran budaya seperti adat, sastra, bahasa, kepercayaan.
- 3) Mengadakan penelitian tentang warisan budaya;
- 4) Mengadakan tulisan-tulisan mengenai warisan budaya;
- 5) Mendirikan lembaga lembaga atau pusat-pusat penyimpanan, pendokumentasian, dan pengkajian warisan budaya berupa museum, sanggar budaya, pust kajian budaya, bengkel-bengkel seni budaya;
- 6) Mengembangkan lembaga pendidikan warisan budaya di setiap daerah dari tingkat Sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi, baik formal maupun informal seperti kursus tari, busana, olahraga, akademi atau institut seni budaya;
- 7) Mengadakan pertemuan berkala secara regional maupun nasional terkait prospek warisan budaya.

Kesadaran akan kekayaan dan potensi kebudayaan serta kesadaran untuk memanfaatkannya, hendaklah ditumbuhkan pada masyarakat agar menjadi modal untuk menghadap berbagai tantangan di tingkat nasional, regional maupun lokal. Lebih lanjut, upaya pelestarian dan dan pemanfaatan warisan budaya sangat bermakna dalam kerangka menciptakan kepribadian dan kondisi pembangunan yang baik. Untuk itu, kita bersama membutuhkan aplikasi nilai budaya dalam bentuk.

- 1) Mental pembangunan yang berorientasi pada nilai budaya yang positif dan dinamis sesuai dengan perkembangan;

- 2) Emosi-emosi kemanusiaan yang baik dan positif yang dapat menormalisasikan dan menjawab persaingan pemenuhan kebutuhan dan harapan;
- 3) Keterbukaan kultural yang memungkinkan kita mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan perubahan, persinggungan, saling pengaruh antar budaya;
- 4) Budaya sebagai potensi sumber daya pembangunan yang menjadi sumber dalam perencanaan, pelaksanaan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

2.2.4 Teori *Governance*

Sejak pertama kali muncul, paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami beberapa fase perubahan. Menurut Chemma dalam Keban (2008: 37) terdapat 4 fase perkembangan paradigma dalam administrasi publik yaitu fase *Traditional Public Administration*, *Public Management*, *New Public Management* dan paradigma *Governance*. Perspektif yang dikemukakan oleh Chemma di atas merupakan sebuah bentuk kesimpulan yang menampilkan indikator perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.

a. *Traditional Public Administration*, yang berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidak berpihakan, standarisasi, legal-rational, otoritas, dan profesionalitas.

b. *Public Management*, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar dan lebih sensitif terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan juga peran sektor swasta yang lebih besar, memperkecil ukuran sektor publik dan memperkecil domain dari *traditional public administration*.

c. *New Public Management*, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan orientasi pada hasil, *out-sourcing* dan *contract*

out, serta promosi etika profesi dan anggaran serta manajemen berbasis kinerja.

d. Governance, yaitu suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Esensi dari paradigma ini adalah memperkuat interaksi antara ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta dan civil society dalam mempromosikan *people centered development*. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan mampu memainkan perannya dalam menciptakan kondisi politik dan hukum yang kondusif, sementara sektor swasta menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan dan pihak masyarakat madani (*Civil Society*) menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat.

Jika mengacu pada pengklasifikasian Chemma, saat ini paradigma yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai kepada paradigma *governance*. UNDP dalam Rosidi dan Fajriani (2013:3) menyebutkan bahwa *governance* yang baik sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Perkembangan paradigma dari *government* ke *governance* membuat peran pemerintah tidak lagi bersifat monopoli dalam melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan tetapi bergeser melibatkan *stakeholder* non pemerintah. Bentuk kerjasama yang terjalin antara pihak pemerintah dengan aktor non-pemerintah seperti NGO, perusahaan maupun masyarakat.

Pada konteks teori yang lebih mikro terdapat teori *Collaborative governance* yang memiliki definisi sebagai pengaturan yang mengatur pada satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta hal itu bertujuan untuk membuat

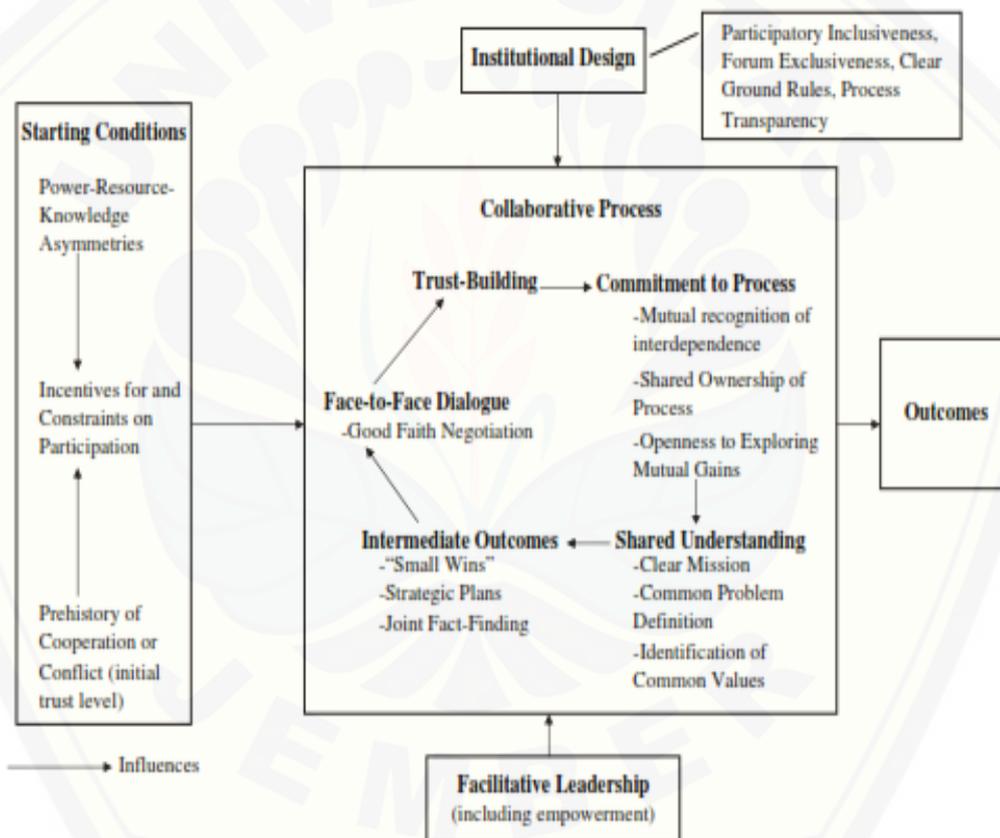
atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik (Ansell dan Gash (2007:2)).

2.2.5 Collaborative Governance

Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2007:2) *Collaborative Governance* adalah “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or asset (aransmen pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik). Sedangkan menurut Zadek dalam O'brien (2012: 1) *Collaborative Governance* didefinisikan *public-private partnerships, essentially collaborative initiatives between state and non-state, commercial and non-profit actors have been born out of their participants' pragmatism. These initiatives have been founded on participants' views of potential synergies in capacities in leveraging improved outcomes for all concerned. This is quite unlike the grand ideological visions of earlier generations of institutional utopias such of nationalization and privatization. But this lack of any over-arching narrative to date should not fool us into missing the fact that lurking beneath the surface of this ad hoc collection of activities is the most exciting new venture along new accountability pathways for development. Indeed, new forms of collaborative governance are likely to provide most radical shake-up of our understanding and practice of accountability in modern times* (kemitraan publik-swasta, pada dasarnya merupakan inisiasi kolaboratif antara negara dan non-negara, aktor komersial dan non-profit telah lahir dari partisipasi pragmatisme. inisiatif Ini telah diketahui partisipan dalam melihat sinergitas potensi kapasitas dalam memanfaatkan hasil yang lebih baik untuk semua pihak. Hal ini cukup berbeda dengan visi kerangka ideologis pada generasi sebelumnya utopia-utopia institusional seperti nasionalisasi dan privatisasi. Tapi kurangnya sebuah narasi

menyeluruh sampai saat ini tidak boleh menipu kita pada analisa fakta yang tersembunyi dibawah permukaan *ad hoc* karena kegiatan ini adalah usaha baru yang paling menarik di sepanjang jalur akuntabilitas untuk pengembangan. Memang, bentuk-bentuk baru dari pemerintahan kolaboratif cenderung untuk memberikan dinamika yang paling radikal dari pemahaman kita dan praktek akuntabilitas di zaman modern).

Figure 1
A Model of Collaborative Governance



Gambar 2.1 *Collaborative Governance Model*

Model Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash (2007:8) seperti yang telah digambarkan dalam bagan terdiri atas beberapa tahapan berikut.

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Bentuk ketidak selarasan tersebut dapat antara lain seperti *distrust*, sikap tidak saling menghormati, antagonisme antar aktor atau pertentangan. Ansel dan Gash (2007: 8) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal *imbalances between the resources or power of different stakeholders, the incentives that stakeholders have to collaborate, and the past history of conflict or cooperation among stakeholders* (ketidakseimbangan antara sumber-sumber atau kekuatan antar *stakeholder* yang berbeda, dorongan-dorongan bahwa aktor-aktor harus berkolaborasi dan latar belakang sejarah konflik dalam bekerjasama *stakeholder*).

a. Ketidakseimbangan sumber daya dan kekuatan

Ketidakseimbangan sumber daya muncul ketika aktor-aktor tidak memiliki kapasitas organisasi, atau sumber daya untuk berpartisipasi maupun partisipasi yang setara dengan *stakeholder-stakeholder* lain. Hal tersebut akan memunculkan kondisi yang lebih negatif apabila aktor penting tidak memiliki infrastruktur organisasional yang representatif untuk menjalankan *Collaborative Governance*. Relasi antar *stakeholder* tersebut dapat dilaksanakan secara efektif ketika masing-masing aktor memiliki komitmen untuk strategi positif pemberdayaan dan representasi pada *stakeholder* yang paling memiliki kekuatan lemah dan sulit untuk berkomitmen paling lemah.

b. Dorongan-dorongan untuk berpartisipasi

Ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antar *stakeholder* maka akan berdampak pada eksklusifitas antar aktor sehingga mempengaruhi komitmen dan dorongan untuk berpartisipasi. Terdapat dua tambahan pada model relasi kontingensi ini yaitu pertama, apabila terdapat tempat alternatif dimana aktor-aktor mampu mendapatkan tujuan-tujuan mereka secara sepihak maka *Collaborative Governance* hanya akan bekerja jika aktor-aktor melihat diri mereka sangat membutuhkan hubungan interdependensi. kedua, apabila interdependensi bersifat

kondisional atas forum kolaborasi maka sponsor-sponsor harus melakukan pekerjaan lebih dalam mendapatkan forum-forum alternatif untuk menghormati dan menghargai hasil dari proses kolaborasi.

c. *Pre-History*

Ketika masing-masing stakeholder memiliki kapasitas relasi yang tinggi maka akan memunculkan intensitas konflik yang tinggi mampu menciptakan dorongan yang kuat untuk berkolaborasi. Konflik menjadi sebuah indikasi bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki kesadaran dan komitmen dalam berkolaborasi. Komitmen tersebut harus dibarengi dengan sifat saling percaya dan interdependensi maka konflik akan menghasilkan sifat konstruktif yang menguatkan kolaborasi.

2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative leadership*)

Aspek kepemimpinan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah dengan non-pemerintah. Kepemimpinan merupakan bagian krusial dan memiliki peran secara jelas dalam menetapkan peraturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan menganalisa keuntungan bersama. Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
- b. pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c. memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Kolaborasi yang sukses itu menggunakan mekanisme *Multiple Leadership*. Lasker dan Weis dalam Ansell (2007:12) mengemukakan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif harus memiliki keterampilan-keterampilan berupa (1) mempromosikan secara luas dan aktif berpartisipasi, (2) memastikan pengaruh dan kontrol secara luas (3)

memfasilitasi produktivitas dinamika-dinamika kelompok atau aktor, (4) mampu memperluas cakupan proses.

Ketika tidak terdapat relasi yang bersifat simetris antara pemerintah dengan swasta maka harus dimunculkan pemimpin “organik” yang berasal dari *stakeholder* masyarakat. Ketersediaan pemimpin seperti itu akan sangat bergantung pada keadaan lokal.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash (2007: 13) mendeskripsikan bahwa Desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus di tekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. Karena hanya beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Proses harus terbuka dan inklusif karena hanya kelompok yang merasa memiliki kesempatan yang sah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan komitmen dalam proses yang terjadi. Pemerintah dalam konteks ini harus bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang luas kepada *stakeholder* yang terlibat. Chrislip dan Larson dalam Ansell (2007:14) menyatakan kondisi awal dari kolaborasi yang sukses adalah harus adanya inklusifitas yang terbuka lebar bagi seluruh aktor yang dipengaruhi oleh atau yang peduli terhadap isu ini.

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada (1) kesempatan bagi setiap aktor berkomunikasi dengan *stakeholder* lain tentang hasil-hasil kebijakan,(2) klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat aktor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi aktor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus ada keterlibatan aktor lain secara inklusif. Dalam proses desain

intitusal tersebut harus memakai orientasi yang bersifat konsensus. Isu desain intitusal harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Dalam kajian-kajian literatur yang sudah dilaksanakan kita berhenti pada bahwa proses kolaborasi terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang untuk bergantung pada pencapaian hanya mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog *Face to Face*.

a. Dialog tatap muka (*Face to face*)

Seluruh kolaboratif governance terbangun dari dialog tatap muka antar aktor. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, memunculkan kesempatan bagi setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang-peluang keuntungan bersama. Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi. Karena yang ditekankan pada tahap awal adalah bagaimana membangun konsensus bukan untuk mengatur keuntungan masing-masing aktor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun *trust*, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses. Meskipun dialog tatap muka adalah sebuah kebutuhan tetapi tidak cukup berhenti pada fase ini saja tetapi harus ada mekanisme lanjutan.

b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Ketiadaan kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, beberapa literatur menyatakan proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. *Trust building* menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholder* agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi

c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

Meskipun terminologi komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberapa contoh kasus mengungkapkan bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen erat hubungannya pada motivasi yang bersifat orisinal untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam kolaborasi. Komitmen bergantung pada kepercayaan akan aktor-aktor lain mau menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Hal ini juga menjelaskan secara gamblang seberapa bersih, seberapa adil dan transparan prosedur. Sebelum berkomitmen pada sebuah proses yang berjalan dengan arah tidak terprediksi, aktor-aktor harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa prosedur deliberasi dan negosiasi memiliki integritas. Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Kolaboratif pemerintah dapat membentuk rasa kepemilikan terhadap pengambilan keputusan dari lembaga agensi atau pemerintah kepada *stakeholder* yang bertindak secara kolektif.

Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggung jawab terhadap proses. *Trust* memiliki peranan

dalam menjamin bahwa masing-masing aktor memiliki tanggung jawab tersebut. Bentuk-bentuk mandatori dalam bentuk kolaborasi dapat dilaksanakan ketika dorongan untuk berpartisipasi antar aktor bersifat lemah, akan tetapi kooperasi yang bersifat mandatori mengindikasikan adanya kelemahan komitmen antar aktor. Tinggi rendahnya sifat ketergantungan antar aktor akan menentukan kesuksesan proses kolaborasi.

d. *Share Understanding*

Dibeberapa poin proses kolaborasi, aktor-aktor harus mengembangkan *share understanding* (sikap saling memahami) terhadap apa yang akan di capai bersama. *Share understanding* dalam beberapa literasi disebut sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan, visi bersama, ideologi bersama, tujuan-tujuan yang jelas, arah yang strategis dan jelas atau keselarasan nilai-nilai inti. *Share understanding* juga dapat berarti kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah.

e. Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)

Banyak studi kasus memperlihatkan bahwa kolaborasi secara relatif dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari kolaborasi. Meskipun hasil sementara ini akan menampilkan output atau keluaran nyata akan tetapi proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Dalam proses *intermediate outcomes* tidak dapat di generalisir sebagai hasil akhir yang dicapai.

2.2.6 Stakeholder

Definisi *Stakeholder* menurut Freeman dan Reed (1983:91) adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Mengacu pada asumsi Freeman, *stakeholder* dalam satu kondisi waktu dapat mempengaruhi dan pada

kondisi tertentu dapat dipengaruhi oleh suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Menurut Freeman (1998) terdapat beberapa jenis stakeholder, yaitu :

1. orang-orang yang dipengaruhi oleh usaha dan dapat mempengaruhi tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. sektor Swasta, orang-orang yang (atau mungkin) terpengaruh oleh tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi atau kelompok, contohnya adalah orang tua, anak-anak, pelanggan, pemilik, karyawan, rekan, mitra, kontraktor, pemasok, orang-orang yang terkait atau terletak didekatnya. Setiap individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi dalam pencapaian tujuan kelompok;
3. individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebuah kelompok atau kesuksesan organisasi dalam memberikan hasil yang diharapkan dan dalam menjaga kelangsungan hidup kelompok atau produk maupun jasa. Stakeholder pengaruh program, produk dan jasa;
4. setiap organisasi, badan pemerintah atau individu yang memiliki saham atau mungkin dipengaruhi oleh pendekatan yang diberikan kepada regulasi lingkungan, pencegahan polusi, konservasi energi.
5. Seorang Peserta dalam upaya mobilisasi masyarakat, yang mewakili segmen tertentu dari masyarakat. Anggota dewan sekolah, organisasi lingkungan, pejabat terpilih, perwakilan kelompok dagang, anggota dewan penasihat lingkungan, dan pemimpin agama.

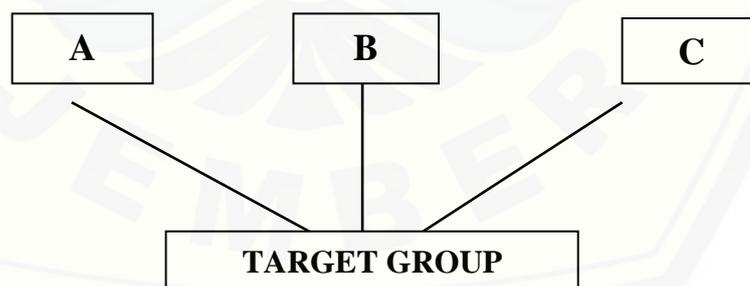
2.2.7 Kordinasi Pelaksanaan Program

Kordinasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila seluruh stakeholder, terutama penanggung jawab utama implementasi, perlu memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program. Menurut Hall dan O'toole jr dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:154) terdapat tiga kategori mekanisme kerja atau hubungan antar

Stakeholder yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan atau pelaksanaan program, sebagai berikut.

1. Proses Implementasi dengan Menggunakan Mekanisme Kerja Mengutub (*Pooled*).

Proses implementasi dengan menggunakan mekanisme kerja yang bersifat mengutub terjadi ketika suatu kebijakan dalam proses implementasinya melibatkan banyak organisasi (departemen/ lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu. Meskipun dalam implementasinya melibatkan banyak organisasi, namun dalam logika kerja yang bersifat mengutub ini, masing-masing organisasi yang terlibat dalam implementasi tidak saling tergantung antara yang satu dengan yang lain dalam melakukan *delivery mechanism* atas keluaran-keluaran kebijakan yang mereka hasilkan kepada kelompok sasaran. Dengan karakteristik independensi yang tinggi seperti ini, maka kordinasi yang dibutuhkan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi sangat minimal. Bentuk kordinasi yang dibutuhkan adalah pembagian tugas yang jelas di awal ketika implementasi akan dilaksanakan. Setelah pembagian tugas disepakati maka masing-masing organisasi dapat bekerja sendiri-sendiri untuk menjangkau kelompok sasaran sesuai dengan tugas masing-masing



Gambar 2.2 Mekanisme Kerja Mengutub (*pooled*)

2. Proses Implementasi dengan Menggunakan Mekanisme Kerja Berurutan (*Sequential*).

Proses implementasi dengan model ini terjadi ketika implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran

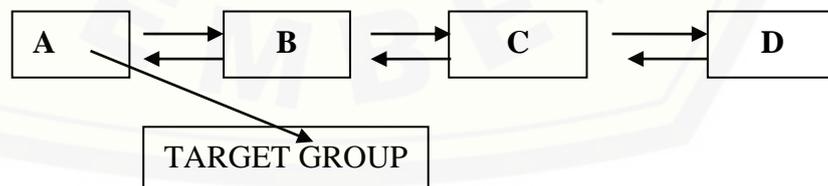
tertentu. Dalam proses implementasi tersebut terjadi hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi *input-output*, yaitu *output* organisasi pertama akan menjadi *output* organisasi kedua, demikian seterusnya sehingga keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan dipengaruhi kerjasama seluruh organisasi yang terlibat dalam implementasi.



Gambar 2.3 Mekanisme Kerja Berurutan (*Sequential*)

3. Proses Implementasi dengan Menggunakan Mekanisme Kerja Timbal-Balik (*Reciprocal*).

Pada model ini, implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi dan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika input yang telah diproses tersebut akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input. Logika tersebut akan digambarkan dalam gambar 2.8.



Gambar 2.4 Mekanisme Kerja Timbal-Balik (*Reciprocal*).

Pada penelitian dengan objek Banyuwangi Ethno Carnival, peneliti melihat interaksi kerja antar aktor memiliki kesesuaian dengan model timbal-balik (*Reciprocal*) dalam penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival. Masing-masing aktor *Stakeholder* antara pemerintah, budayawan, dan

untuk menjadi peserta sekaligus menumbuhkan animo penonton dari kalangan masyarakat lokal Banyuwangi. Hasil wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Budaya dan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

“Pada tahap sosialisasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan camat agar mengkondisikan sekolah-sekolah di daerahnya. Camat nantinya yang akan memberitahukan pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* ke sekolah mulai tingkat SD sampai SMA. Selain mekanisme tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui Bidang Pemasaran memasang iklan melalui berbagai media seperti media cetak, televisi lokal maupun memasang baliho dan spanduk di beberapa titik Kabupaten Banyuwangi”. (Rabu, 13 Januari 2016)

d. Musik pengiring *Banyuwangi Ethno Carnival*

Musik menjadi salah satu elemen yang vital dalam pagelaran *Banyuwangi Ethno Carnival*. Musik menjadi instrumen pendukung utama untuk menampilkan pagelaran *Banyuwangi Ethno Carnival* yang lebih menarik. Penentuan bentuk musik disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh Budayawan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Dewan Kesenian Blambangan adalah pihak yang diberikan wewenang untuk menyeleksi bentuk musik yang sesuai dengan kebudayaan yang diangkat dalam *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Pada tahap ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi fasilitator untuk mengundang musisi lokal untuk menentukan musik yang akan digunakan dalam pagelaran. Disbudparada Banyuwangi mengundang Nanang Rianto selaku *arranger* musik serta musisi-musisi lokal karya musik yang akan ditampilkan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival*. Pada tahap selanjutnya, Dewan Kesenian Blambangan akan memberikan pengarahan kepada *arranger* dan musisi terhadap musik yang ditampilkan. Segala macam pemilihan detail musik dibawah pengawasan langsung Dewan Kesenian Blambangan. Bentuk musik yang digunakan untuk *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah musik tradisional. Musik yang telah melalui proses konsuktatif dari Dewan Kesenian Blambangan tersebut

yang nantinya akan dibawakan dalam pagelaran *Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil wawancara dengan Sutripno, Kordinator Musik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

“Dalam penentuan musik *Banyuwangi Ethno Carnival*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengundang *arranger* musik “Banyuwangenan” Nanang Rianto dan musisi lokal untuk mendesain musik yang akan dilaksanakan saat acara. Setelah kami undang, Nanang Rianto dan musisi lokal tersebut akan berkonsultasi dengan Dewan Kesenian Blambangan untuk menentukan musik yang sesuai dengan tema *Banyuwangi Ethno Carnival*. Seniman dan budayawan bertugas untuk memberikan pengarahan dan musisi atau *arrangeri* akan mengikuti request musik yang sesuai”. (Rabu, 13 Januari 2016)

e. Audisi Peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*

Setelah fase persiapan teknis penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* selesai, penyelenggara membuka audisi bagi peserta carnival. Mengacu kepada kesepakatan aktor penyelenggara, Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* memiliki kewajiban untuk menyeleksi peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011 dan 2012. Sedangkan pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013 dan 2014 peran Manajemen *Jember Fashion Carnival* digantikan oleh Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi. Pelaksanaan Audisi peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* tersebut difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan menyewakan beberapa gedung yang ada di sekitar kota Banyuwangi.

Pelaksanaan audisi peserta dilaksanakan karena ketentuan dari penyelenggara untuk memberikan batas kuota bagi para peserta yang akan tampil sebagai peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*. Tahap audisi peserta tersebut dilaksanakan selama satu hari pada pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011, 2012 dan 2013. Sedangkan pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2014 audisi peserta dilaksanakan selama dua hari karena adanya penambahan konsep yaitu melibatkan peserta cilik yang berasal dari Sekolah Dasar atau madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Banyuwangi.

Para aktor yang menjadi juri seperti Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi atau Manajemen *Jember Fashion Carnival*, Budayawan menilai para kontestan yang mendaftar dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain kemampuan tari, percaya diri hingga gestur tubuh yang ditampilkan oleh masing-masing peserta audisi. Dari seluruh peserta yang mendaftar akan diseleksi peserta yang lolos untuk fase selanjutnya mengacu pada penjurian yang telah dilaksanakan. Fase selanjutnya yang harus di lalui peserta yang lolos audisi peserta adalah mengikuti *workshop Banyuwangi Ethno Carnival*. Berikut ini hasil wawancara dengan Ayi, Ketua komunitas Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi yang juga pernah terlibat sebagai juri audisi di bawah naungan Manajemen *Jember Fashion Carnival*.

“Untuk tahap audisi peserta aktor yang terlibat adalah Instruktur Putra Asli Banyuwangi dengan Budayawan. Sedangkan untuk penyelenggaraan BEC yang pertama dan kedua peran kami dilaksanakan oleh Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Pelaksanaan audisi tersebut difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Untuk pelaksanaan audisi peserta BEC 2011,2012 dan 2013 dilaksanakan selama 1 hari. Di tahun 2014 ketika terjadi perubahan konsep dengan mengikutsertakan BEC cilik, waktu penjurian menjadi dua hari dengan rincian di hari pertama untuk BEC Cilik dan hari kedua untuk peserta BEC dewasa. Penilaian kepada peserta menyangkut aspek kemampuan tari tradisional, kepercayaan diri dan gestur tubuh mereka”. (Kamis, 21 Januari 2016)

f. *Workshop Banyuwangi Ethno Carnival*

Peserta yang lolos audisi akan mengikuti proses *workshop Banyuwangi Ethno Carnival*. Penyelenggaraan *Workshop Banyuwangi Ethno Carnival* difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Pihak Dinas Kebudayaan menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait gedung dan tempat karantina bagi para peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*. Pihak Manajemen *Jember Fashion Carnival* menjadi pihak yang berwenang untuk memberikan materi selama *workshop Banyuwangi Ethno Carnival* 2011 dan 2012. Sedangkan Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi terlibat pada penyelenggaraan *workshop* di tahun 2013 dan 2014. Pada tahapan ini peserta yang

lolos audisi akan menjalani masa karantina untuk mendapatkan pelatihan *skill* yang dibutuhkan untuk menjadi kontestan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Karantina kepada peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* dilaksanakan selama tiga hari dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan kemampuan mendalam kepada peserta yang mengikuti karnaval tersebut. Hasil wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada fase *workshop Banyuwangi Ethno Carnival* memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas sarana dan parasarana yang dibutuhkan seperti gedung untuk pelaksanaan *workshop*, penginapan bagi para peserta dan keperluan akomodasi yang diperlukan oleh para peserta. *Workshop* tersebut dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan kemampuan untuk menjadi peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*. Manajemen *Jember Fashion Carnival* terlibat sebagai pelaksana untuk pelatihan selama *workshop* di tahun 2011 dan 2012. Setelah kontrak selesai dengan Manajemen JFC, wewenang tersebut digantikan oleh Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi di tahun 2013 dan 2014”.
(Rabu, 13 Januari 2016)

Pada *workshop Banyuwangi Ethno Carnival*, para peserta akan mendapatkan materi dari instruktur baik dari Manajemen *Jember Fashion Carnival* maupun dari Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi. Materi yang diberikan oleh pihak Manajemen *Jember Carnival* terdiri atas beberapa unsur seperti konsep pelatihan dan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang dimiliki Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Kurikulum tersebut terdiri atas materi-materi seperti koreografi, *make up*, *fashion design*, *leadership*, proses untuk mendisain sebuah kostum. Unsur di dalam pembelajaran dan pelatihan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai bekal ketika menjadi peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil Wawancara dengan Iwan, Staff Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai berikut.

“Pada tahap *Workshop Banyuwangi Ethno Carnival* tersebut para peserta akan mendapatkan pelatihan dan pembelajaran dari pihak Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Pembelajaran dan pelatihan tersebut mengacu kepada kurikulum yang biasa kami lakukan untuk *Jember Fashion Carnival*. unsur materi yang ada di dalam kurikulum tersebut secara umum terdiri atas beberapa materi seperti koreografi,

make up, fashion design, leadership, proses untuk mendisain sebuah kostum". (Senin, 25 Januari 2016)

Sedangkan keterlibatan pihak Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi secara umum tidak berbeda jauh dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dalam memberikan materi dalam *workshop Banyuwangi Ethno Carnival*. Kondisi tersebut tidak terlepas dari komposisi skuad yang ada dalam Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi pernah menjadi bagian dalam Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Keterlibatan Instruktur Putra Asli Banyuwangi dalam pelaksanaan *workshop Banyuwangi Ethno Carnival* menyangkut pemberian materi kepada peserta. Materi yang diberikan terkait dengan koreografi, *fashion run way, fashion desain, make up, Kostum, leadership, dance* tradisinal dan modern serta ekspresi. Kurikulum yang di berikan tersebut merupakan hasil dari pengembangan swawasan dan ilmu yang diperoleh oleh masing-masing anggota Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi ketika menajdi bagian dalam penyelenggaraan karnaval bersama Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Selama pemberian materi tersebut para peserta akan berada dalam proses karantina selama empat hari. Selama proses karantina tersebut masing-masing peserta akan mendapatkan proses pelatihan dengan ketentuan waktu mulai pukul 7 pagi sampai jam 9 malam dengan dikurangi waktu istirahat. Hasil wawancara dengan Ayi, ketua Instruktur Putra Asli Banyuwangi sebagai berikut.

“Keterlibatan Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi dalam *workshop* adalah memberikan pelatihan terkait materi dan peningkatan *skill* yang dibutuhkan untuk menjadi peserta Banyuwagi Ethno Carnival. Pelatihan yang diberikan berisi materi tentang koreografi, *fashion run way, fashion desain, make up, Kostum, leadership, dance* tradisinal dan modern serta ekspresi. Materi tersebut diberikan selama 4 hari melalui karantina untuk para peserta. Materi diberikan mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam sehingga seluruh materi yang diberikan dapat tersampaikan kepada peserta”. (Kamis, 21 Januari 2016)

g. Presentasi kostum 60% dan 90 %

Peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* yang telah selesai mengikuti *workshop* diberikan kesempatan untuk mendesain kostum secara mandiri. Dengan berbekal

referensi prototipe kostum yang disampaikan pada *workshop* serta kemampuan yang dimiliki dari hasil pelatihan, masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk mengkreasikan kostum yang akan dibawa pada *show time Banyuwangi Ethno Carnival*. Kostum yang akan dikenakan oleh masing-masing peserta tersebut nantinya akan dikontestasikan untuk ditentukan pemenangnya oleh juri.

Sebelum dikontestasikan pada tahapan *show time Banyuwangi Ethno Carnival*, peserta wajib mempresentasikan kostum setengah jadi kepada juri. Pada fase ini terdapat dua kali penilaian, yaitu kesiapan kostum 60% dan kesiapan kostum hampir jadi dengan prosentase 90%. Para pihak yang terlibat sebagai juri pada tahapan ini adalah Dewan Kesenian Blambangan bersama dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* atau Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi. Kostum setengah jadi tersebut menjadi unsur yang dinilai oleh masing-masing juri untuk diakumulasikan dengan fase-fase penjurian yang lain. Waktu untuk pelaksanaan penjurian kostum setengah jadi tersebut berlangsung selama 2 minggu. Untuk penilaian kesiapan 60 % menghabiskan waktu satu minggu dan untuk kesiapan kostum 90% juga memakan waktu satu minggu. Hasil wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

“Setelah mengikuti *workshop* masing-masing peserta akan mendesain kostum secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi dan disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan. Setelah kostum yang didesain peserta tersebut selesai setengah jadi akan dipresentasikan kepada juri yang terdiri dari Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* ditahun 2011 dan 2012 atau Instruktur Putra Asli Banyuwangi di tahun 2013 dan 2014. Terdapat dua tahap penilaian yaitu presentasi kesiapan kostum 60% dan 90%. Penilaian tersebut berlangsung selama 2 minggu, dimana minggu pertama untuk penilaian 60% dan berselang beberapa waktu dilanjutkan penilaian kesiapan kostum 90%”. (Rabu, 13 Januari 2016)

h. Grand Juri *Banyuwangi Ethno Carnival*

Tahapan utama sekaligus akhir pada pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah *show time*. Pada tahap *show time* peserta akan membawakan kostum yang telah di desain sesuai dengan tema untuk dikontestasikan dan

ditampilkan di jalanan protokol Kota Banyuwangi. Para kontestan akan berjalan sejauh 3 KM dengan start Lapangan Blambangan Banyuwangi dan Finish di depan pendopo Kabupaten Banyuwangi. *Show time Banyuwangi Ethno Carnival* sejak pelaksanaan di tahun 2011 sampai 2014 berlangsung pada siang hari mulai pukul 12:30 WIB.

Parade kostum Karnaval yang di tampilkan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* terbagi atas dua bagian yaitu menampilkan kostum budaya Asli pada barisan pertama dan diikuti oleh parade peserta yang membawakan kostum yang telah dikreasikan sedemikian rupa oleh masing-masing peserta. Saat menampilkan peserta berparade di jalanan Banyuwangi, terdapat iringan musik etnik yang ditampilkan oleh musisi-musisi lokal Banyuwangi. Musik yang ditampilkan sebagai pengiring tersebut menjadi penambah semarak pelaksanaan *show time Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

“Peserta dengan memakai kostum yang mereka desain sendiri akan berparade melewati jalan protokol saat *show time Banyuwangi Ethno Carnival*. Karnaval dimulai sekitar pukul 12:30 siang dengan start lapangan Blambangan dan Finish di depan pendopo bupati Kabupaten Banyuwangi. Dua kostum yang nantinya akan dibawakan saat karnaval yaitu kostum budaya aslinya di barisan depan dan kostum yang telah dibuat oleh peserta dengan tampilan kolaborasi unsur tradisional dan modern akan ditampilkan di barisan setelahnya. Musik etnik dari musisi lokal akan mengiringi para peserta ketika berleenggak-leenggok saat *show time Banyuwangi Ethno Carnival*. (Rabu, 13 Januari 2016)

Bagi peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*, tahap *show time* menjadi ajang utama untuk memamerkan busana yang telah di kreasi secara mandiri sekaligus ajang penentu dalam mengkontestasikan kostumnya yang bermuara kepada juara pada *event Banyuwangi Ethno Carnival*. Pada tahap *show time* setiap peserta akan mendapatkan penilaian dari juri dengan mengacu pada berbagai aspek yang ditampilkan dalam *show time Banyuwangi Ethno Carnival*. Tim Juri pada tahap *show time* terdiri dari budayawan, instruktur karnaval dari Manajemen *Jember Fashion Carnival* atau dari Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi serta

mengundang juri dari fotografer serta tokoh media terkemuka di Banyuwangi. masing- masing juri tersebut akan menilai peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* dengan mengacu kepada beberapa indikator penilaian antara lain kreativitas, *performance*, *make up*, ekspresi dan kostum. Dengan mengacu pada indikator-indikator penilaian yang telah ditentukan, para juri akan memilih beberapa kontestan *Banyuwangi Ethno Carnival* yang layak untuk menjadi juara. Hasil wawancara dengan Ayi, ketua Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi sebagai berikut.

“Pada tahap *show time Banyuwangi Ethno Carnival*, masing-masing peserta yang tampil akan mendapatkan penilaian dari dewan juri. Para peserta tersebut akan dinilai dari tim juri yang terdiri dari budayawan, instruktur, serta mendatangkan fotografer dan tokoh media terkemuka di Banyuwangi. unsur yang dinilai kepada masing-masing peserta mengacu pada indikator kreativitas, *performance*, *make up*, ekspresi dan kostum. Para dewan juri akan menseleksi peserta tersebut untuk menentukan kontestan yang layak mendapatkan juara dan hadiah. (Kamis, 21 Januari 2016)

4.5 Hambatan dalam Collaborative Governance pada pelaksanaan Banyuwangi Ethno Carnival.

4.5.1 Faktor Kebudayaan

Pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* yang konsisten tidak terlepas dari peran kerjasama yang terjalin antar aktor pelaksana yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Manajemen *Jember Fashion Carnival* atau Instruktur Putra Asli Banyuwangi maupun dengan Dewan Kesenian Blambangan. Pada setiap momen relasi antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak terlepas dari berbagai kendala di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam membangun relasi antar *stakeholder* adalah terkait unsur Kebudayaan dalam konsep yang di gunakan dalam *event Banyuwangi Ethno Carnival*.

Konsep yang digunakan dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah mengkolaborasikan unsur budaya lokal khas Banyuwangi dan dikemas dengan penampilan karnaval modern. Kolaborasi tersebut adalah suatu yang baru dalam penyelenggaraan *event* karnaval karena menggabungkan dua unsur yang berada pada kutub yang berbeda. Pada konteks penggabungan unsur lokal dan modern ini, terdapat kontradiksi perspektif antara Dewan Kesenian Blambangan dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Awal persoalan ini muncul ketika Dewan Kesenian Blambangan sebagai pihak non pemerintah yang memperhatikan keberlangsungan budaya Banyuwangi memiliki satu asumsi bahwa penggabungan unsur lokal dengan tampilan modern akan menggerus budaya asli Banyuwangi.

Pada satu sisi, ketakutan Dewan Kesenian Blambangan terhadap penggerusan budaya semakin besar ketika hadirnya *stakeholder* lain yaitu Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai konsultan. Manajemen *Jember Fashion Carnival* dengan reputasi dan kapabilitas menyelenggarakan Karnaval bersifat kontemporer membuat Dewan Kesenian Blambangan mulai memasang Rambu-rambu tentang kaidah-kaidah yang harus dipatuhi sebagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya Banyuwangi. Pada pertemuan *stakeholder* awal yang difasilitasi Bupati Banyuwangi dan dihadiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Manajemen *Jember Fashion Carnival* serta Dewan Kesenian Blambangan sudah muncul perbedaan persepsi terkait bagaimana mendesain masuknya inovasi kemasan modern dalam tema lokal khas Banyuwangi. Seperti asumsi yang dinyatakan Bambang Lukito dalam wawancara menyebutkan bahwa kolaborasi dua unsur menimbulkan kerawanan perubahan bentuk dan warna asli budaya sehingga akan berdampak pada perubahan makna dan keasliannya.

“Dewan Kesenian Blambangan sebagai pihak yang memperhatikan kelestarian budaya Banyuwangi memberikan banyak pertimbangan kepada Manajemen *Jember Fashion Carnival* terkait batasan-batasan dalam mengkreasikan budaya lokal yang akan ditampilkan dalam kostum karnaval modern. Hadirnya Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai pihak yang berperan sebagai konsultan dan perancang busana kostum membuat kami memberikan referensi bahwa kultur lokal dengan beragam bentuk serta memiliki nilai-nilai tertentu tidak boleh dirubah seenaknya. Ketika bentuk dan warna khas

yang melekat pada sebuah budaya itu dirubah maka makna yang berisi nilai-nilai tertentu didalamnya akan hilang”. (Kamis, 14 Januari 2016)

Resistensi tersebut juga dirasakan oleh Manajemen *Jember Fashion Carnival* ketika berdialog dengan Dewan Kesenian Blambangan saat forum awal komunikasi. Iwan sebagai salah satu staff Manajemen *Jember Fashion* yang mewakili dalam komunikasi melihat bahwa budayawan memiliki pandangan yang absolut dan tidak mau memberikan toleransi terhadap kreasi dan inovasi dengan memakai tema budaya lokal.

“Komunikasi yang terjadi saat forum antara Azwar Anas dan instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Budayawan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* membicarakan terkait dengan rencana pelaksanaan Karnaval di Banyuwangi. Pada forum tersebut kami melihat bahwa terdapat potensi perbedaan pendapat antara kami dengan budayawan. Budayawan dan seniman Banyuwangi memiliki pandangan yang tegas terkait dengan rencana inovasi konsep *Banyuwangi Ethno Carnival*. Para Budayawan dan Seniman masih ingin mempertahankan secara penuh budaya yang dimiliki oleh Banyuwangi dan tidak boleh melanggar ketentuan semisal dengan mengubah ciri khas budaya yang melekat”. (Senin, 25 Januari 2016)

Persepsi saling curiga antar aktor tersebut membuat *trust* sulit terbentuk antar aktor untuk saling bekerjasama. Padahal unsur kepercayaan menjadi elemen yang penting dalam membangun kerjasama antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Perbedaan persepsi antar *stakeholder* non-pemerintah terkait kebudayaan memiliki kerentanan terhadap kelancaran proses persiapan penyelenggaraan karnaval untuk itu perlu segera diselesaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pihak yang memiliki inisiasi. Usaha komunikasi secara simultan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi sebagai wakil dari pemerintah terhadap masing-masing aktor menjadi kunci untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Dengan kebutuhan yang mendesak untuk segera menyelenggarakan karnaval membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus meredam ego. Ego masing-masing *stakeholder* menjadi kunci untuk menyelenggarakan kerjasama agar Banyuwangi dapat terealisasi.

4.5.2 Faktor Institusi

Seluruh *stakeholder* saling bekerjasama untuk mensukseskan *event Banyuwangi Ethno Carnival*. Keterikatan yang terjalin antar *stakeholder* dalam menyelenggarakan BEC memiliki bentuk yang berbeda-beda untuk tiap aktor. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memang menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menggandeng aktor non pemerintah dalam menyelenggarakan hajatan karnaval tersebut. Keterikatan yang terjalin antara Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dengan Dinas memiliki bentuk yang berbeda. Dewan Kesenian Blambangan terlibat dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* disebabkan oleh unsur kebudayaan yang digunakan dalam Karnaval tersebut. Sedangkan keterlibatan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak terlepas dari kerjasama yang dilandasi kontrak kerja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi konsultan *event* karnaval tersebut.

Dengan latar belakang keterlibatan yang berbeda-beda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saling bahu membahu dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dan Dewan Kesenian Blambangan dalam menyelenggarakan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Masing-masing *stakeholder Banyuwangi Ethno Carnival* memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan hasil konsensus yang terlaksana sebelumnya. Pada setiap mekanisme kerja yang dijalankan, masing-masing *stakeholder* memiliki rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Mekanisme kerja saling ketergantungan antar *stakeholder* tersebut dilaksanakan pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011 dan 2012.

Permasalahan timbul pada persiapan pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013. Manajemen *Jember Fashion Carnival* yang terlibat sebagai Konsultan pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011 dan 2012 mengundurkan diri. Manajemen *Jember Fashion Carnival* tidak melanjutkan kerjasama dengan Disbudparada dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* disebabkan karena ada benturan jadwal dengan agenda internal

Manajemen *Jember Fashion Carnival*, seperti yang dijelaskan oleh Iwan staff Manajemen *Jember Fashion Carnival* pada hasil wawancara berikut.

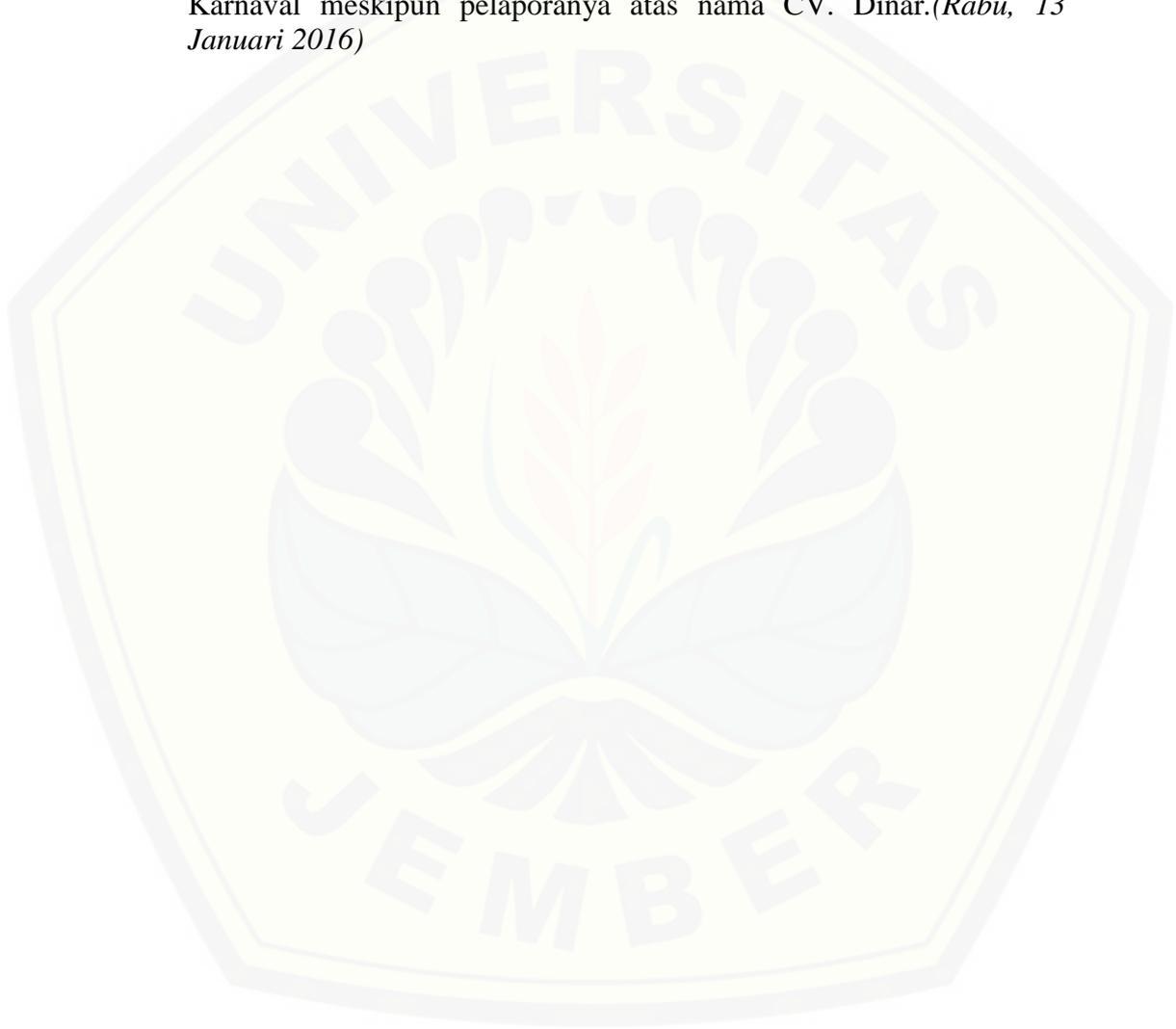
“Putusnya hubungan kerja antara Manajemen *Jember Fashion Carnival* dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh perubahan jadwal secara sepihak. Pemerintah merubah jadwal yang telah di sepakati sebelumnya tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Perubahan jadwal tersebut membuat kami tidak bisa ikut serta dalam *Banyuwangi Ethno Carnival 2013* karena berbenturan dengan agenda lain yang dimiliki oleh manajemen *Jember Fashion Carnival*. Dengan terputusnya kerjasama tersebut Manajemen *Jember Fashion Carnival* tidak terlibat lagi dalam *Banyuwangi Ethno Carnival*”(Senin, 25 Januari 2016)

Mundurnya Manajemen *Jember Fashion Carnival* membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencari pengganti untuk menjalankan tanggung jawab sebagai konsultan. Lowongnya posisi Manajemen *Jember Fashion* membuat skema kerja saling ketergantungan antar aktor yang selama ini dijalankan tidak dapat terlaksana.

Kondisi tidak adanya konsultan sekaligus instruktur untuk penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdesak untuk secepatnya mencari pengganti. Pejabat Disbudparada Banyuwangi membuat keputusan dengan menggandeng Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sempat mengalami kesulitan karena Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi bukan bersifat organisasi formal dan berbadan hukum. Syarat yang harus dimiliki oleh aktor non pemerintah dalam menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program atau kegiatan adalah organisasi formal berbadan hukum. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mensiasati kondisi tersebut dengan menggunakan CV. Dinar sebagai wadah sementara bagi Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi dalam keterlibatannya sebagai instruktur *Banyuwangi Ethno Carnival*. CV. Dinar digunakan sebagai instansi atas nama semata dalam pelaporan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Budaya dan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

“Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi menggantikan peran yang dijalankan Manajemen *Jember Fashion Carnival* sejak

pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013. Tim tersebut terdiri dari orang-orang yang sebelumnya bernanung pada Manajemen *Jember Fashion Carnival*, tetapi keluar dan membentuk komunitas sendiri. Karena syarat kerjasama dengan pemerintah harus bersifat organisasi formal berpayung hukum maka kami menggandengkannya dengan CV. Dinar sebagai atas nama semata agar kami dapat bekerjasama. Tetapi dilapangan kerjasama yang terjalin murni antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tim Instruktur Putra Asli Banyuwangi. Kontrak kerja yang terjalin langsung dengan Instruktur Karnaval meskipun pelaporanya atas nama CV. Dinar. (Rabu, 13 Januari 2016)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Relasi yang terjadi antar pihak dalam membangun *collaborative governance* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* melalui beberapa tahapan yang bermuara pada sebuah kerjasama yang bersifat simultan. Pada tahap awal pembentukan kerjasama antar pihak di tahun 2011 melibatkan beberapa pihak antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Akan tetapi, proses kerjasama antar *stakeholder* di tahun 2011 masih berbentuk *public private partnership* karena belum terbentuk pola kerjasama yang stabil dan terstruktur.

Pada tahun 2012 baru terbentuk sebuah *collaborative governance* yang stabil dengan tahapan kerjasama yang terstruktur. Tahapan kerjasama diawali dialog awal persiapan yang melibatkan tiga *stakeholder* dan didukung komunikasi informal dalam frame pembahasan masalah yang sama. Kemudian terbentuk juga *trust* antar masing-masing pihak dalam bekerjasama. Terbangun lanjutan komitmen yang terlegitimasi oleh Mou dan SK Bupati terkait DKB. Proses *collaborative* terakhir adalah membangun sikap saling memahami yang menghasilkan output persiapan penyelenggaraan BEC

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* menjalani masing-masing tahapan *collaborative governance* tersebut dengan menghasilkan sebuah *outcomes* berupa teknik operasional penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*, sebagai berikut.

- i. Penentuan tema *Banyuwangi Ethno Carnival*;
- j. Protoripe kostum peserta;
- k. Sosialisasi peserta;
- l. Musik pengiring *Banyuwangi Ethno Carnival*;
- m. Audisi peserta;
- n. Workshop *Banyuwangi Ethno Carnival*;

- o. Presentasi kostum;
- p. *Show time Banyuwangi Ethno Carnival*.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dan Dewan Kesenian Blambangan bersepakat untuk membagi peran dalam tahapan operasional penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Relasi kerjasama tersebut terjalin dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2012.

Pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013 dan 2014 komposisi pihak yang membangun *collaborative governance* mengalami pergantian. Pengunduran diri dari pihak Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai konsultan membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak dari pemerintah yang memiliki hajatan mencari pengganti dengan menunjuk Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi sebagai konsultan untuk penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013 dan 2014.

Karena Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi tidak berbadan hukum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mensiasati dengan menunjuk dan mengatasnamakan CV. Dinar untuk memenuhi syarat legalitas organisasi berbadan hukum. Meskipun terdapat pergantian untuk peran konsultan, tahapan operasional penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* dan pembagian peran masing-masing pihak tidak mengalami perubahan. Pergantian komposisi pihak yang berkerjasama menjadi salah satu hambatan dari proses kolaborasi antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perspektif peneliti selama di lapangan, maka peneliti akan mengemukakan beberapa saran. Saran ini ditujukan untuk proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* di periode 2011 sampai 2014. Saran tersebut akan di indikorkan dalam beberapa poin, sebagai berikut.

1. Mendorong pembentukan badan hukum bagi komunitas Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi agar bisa langsung bekerjasama dalam

collaborative governance Banyuwangi Ethno Carnival tanpa harus mengatasnamakan CV. Dinar sehingga tidak memerlukan pihak perantara dalam menjalin kerjasama antar pihak.

2. Perlunya penerbitan peraturan berbentuk SK oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kerjasama antar pihak sehingga landasan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* mempunyai kekuatan hukum.
3. Pemberian wadah aspiratif dengan membentuk forum komunikasi untuk mendengarkan aspiratif sekolah, universitas atau komunitas yang mendelegasikan personilnya sebagai peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* untuk memberikan perspektifnya terkait keperluan bagi para peserta yang perlu ditingkatkan .
4. Pembentukan wadah yang menampung peserta pemenang *Banyuwangi Ethno Carnival*, sehingga terdapat *reward* berupa ruang aktualisasi yang simultan dan berdampak pada meningkatkannya potensi masing-masing personil.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin. 2007. *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Pemerintahan*. Yogyakarta: Jogja Global Media.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Freeman, Howard. 1998. *Evaluation Systemic Approach*. Jakarta: Sage.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maran, Raga Rafael. 2007. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka.
- Moelong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rosidi, Abidarin dan Anggraeni, R. Fajriani. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

- Soekanto, Surjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sutarto, Ayu dkk. 2004. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember: Kompyawisda Jatim.
- Tuloli, Nani dkk. 2003. *Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: CV Mitra Sari.

Skripsi dan Jurnal

- Freeman, H & Reed, D.1983. Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *Jurnal California Management Review*, 25 (3): 88-106.
- Ansell. C & Gash. A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.
- Hutami, Gartiria. 2011. Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Mustafa, Hasan. 2011. Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis (2011)*, Vol.7, No.2: hal. 143–156.

Produk Hukum

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Jember Fashion Carnival. Nomor: 188/5863/429.012/2011 tentang Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*.
- Pakta Integritas Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Untuk Paket Pekerjaan Audisi dan *workshop* peserta BEC 2013.
- RENJA (Rencana Kerja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2011-2014.
- RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
- Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan Tahun 2010-2013.

Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian
Blambangan

Website

Anwar, Ruli. 2013. Banyuwangi Ethno Carnival Angkat Kebudayaan Lokal. Liputan 6.com. <http://citizen6.liputan6.com/read/687507/banyuwangi-ethno-carnival-angkat-kebudayaan-lokal>. (5 November 2015).

Banyuwangikab.go.id. (Diakses 5 November).

Banyuwangibagus.com (Diakses 3 November).

Banyuwangitourism.com (Diakses 7 November).

Hamdani, Irul. 2012. "Banyuwangi Ethno Carnival di Protes Budayawan Lokal. Detik.com.<http://hot.detik.com/read/2012/10/29/081624/2074627/475/banyuwangi-ethno-carnival-diprotes-seniman-lokal>. (7 November 2015').

Kusbiantoro, Didik. 2014. Kemenpar Dukung "Banyuwangi Festival Masuk Agenda Nasional.Antara.News.Com.<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/146029/kemenpar-dukung-banyuwangi-festival-masuk-kalender-wisata-nasional>.(5 November 2015).

Ningtyas, Ika. 2011. Ribuan Warga Padati Banyuwangi Ethno Carnival. Tempo.com. <http://seleb.tempo.co/read/news/2011/10/22/161362775/ribuan-warga-padati-banyuwangi-ethno-carnival>. (3 November 2015).

Rachmawati, Ira. 2014. Tiga Warisan Budaya Berasal Dari Banyuwangi. Kompas.com.<http://travel.kompas.com/read/2014/10/31/154852427/Tiga-Warisan.Budaya.Nasional.Berasal.dari.Banyuwangi>. (10 November 2015).

Setya, Budi Candra. 2015. Ramai Seni Budaya Banyuwangi di Banyuwangi Ethno Carnival.Tempo.com.<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/20/058711402/ramai-seni-budaya-banyuwangi-di-banyuwangi-ethno-carnival>.(7 November 2015).